

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Muhammad SAW. (w. 632 H) sebagai Nabi dan Rasul Allah telah memberikan contoh dalam memimpin negara. Nabi Muhammad tidak memberikan aturan baku tentang sistem kenegaraan ketika beliau menjadi pemimpin di Madinah, dengan tujuan agar generasi selanjutnya dapat berpikir cerdas untuk mengembangkan sistem kenegaraan. Oleh sebab itu, dalam perjalanan sejarah bentuk pemerintahan sejak zaman Nabi Muhammad sampai pada zaman yang akan datang akan berubah-ubah untuk menyesuaikan dengan kondisi umat.¹

Nabi Muhammad mampu memimpin Madinah yang penduduknya terdiri dari berbagai kabilah. Namun, Nabi Muhammad mampu menghentikan pertentangan sengit antara Bani 'Aus dan Bani Khazraj di Madinah dalam sebuah piagam tertulis pertama di dunia, yaitu Piagam Madinah (*Sahîfah al-Madînah*). Isi dokumen tersebut adalah menetapkan sejumlah hak dan kewajiban bagi kaum muslim, yahudi, dan komunitas-

¹Harun Nasution dan Azumardi Azra, *Perkembangan Modern dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Obor, 1985), h. 10.

komunitas pagan Madinah. Sehingga, mereka menjadi satu kesatuan dalam komunitas dengan prinsip persamaan, persaudaraan, dan persatuan. Maka dari itu, terciptalah kota Madinah yang memiliki peradaban yang tinggi.²

Ini merupakan cukup bukti bahwa Islam juga mengatur kehidupan bernegara. Dikarenakan setiap daerah mempunyai adat dan budaya yang berbeda, maka mulailah para pemikir muslim bermunculan dengan konsep kenegaraan yang tentunya berlandaskan sumber ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan Hadits. Diantara pemikir muslim yang masyhur mengenai konsep kenegaraan adalah al-Farabi(w. 339 H/950 M) dan Ibnu Sina(w. 428 H/1037 M).

Al-Farabi(w. 339 H/950 M) merupakan filosof politik Islam yang *Par Excellence* (para filosof merujuk pada pemikirannya).³ Komunitas intelektual muslim abad pertengahan⁴, dan pada periode modern, menganggap al-Farabisebagai pemikir besar setelah Aristoteles. Tidak hanya

²Marthin Lings, *Muhammad:Kisah Hidup Nabi Berdasarkan Sumber Klasik*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2014), h. 191.

³Yamani, *Filsafat Politik Islam: antara al-Farabi dan Khomeini*, (Bandung: Mizan, 2002), h. 43.

⁴Miriam Galston, *Politic and Excellence; The Political Philosophy of al-Farabi*, (USA: Princeton University Press, 1946), h. 3.

itu, ia juga dianggap guru kedua (*al-Mu'allim al-Tsâni*) yang berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan filsafat Islam.⁵

Banyak faktor yang menyebabkan al-Farabidianggap sebagai guru kedua. *Pertama*, karena kemampuannya yang menonjol dalam bidang logika sehingga ketika masih muda ia mampu melampaui gurunya, yaitu Matta' Ibn Yunus, seorang ahli logika Baghdad saat itu.⁶ *Kedua*, karena kemampuan mengulas pemikiran-pemikiran Aristoteles sehingga mudah dipahami generasi setelahnya.⁷ *Ketiga*, karena ia mampu menciptakan sistem filsafat yang lebih lengkap dibanding pendahulunya, al-Kindi,⁸ sehingga beberapa filosof setelahnya banyak yang berguru kepadanya, semisal Ibnu Sina, Ibnu Rusyd, dan filosof-filosof lain setelah mereka.⁹

⁵Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, USA, (first edition, 1937, and six edition 1956), h. 371.

⁶MM. Sarif (ed), *A History of Muslim Philosophy*, Vol. I, (Weisbaden: Otto Harrassowitz, 1963), h. 451. Lihat juga Majid Fakhry, *A History of Islamic Philosophy*, edisi 2, (New York: Colombia University Press, 1983), h. 109.

⁷M. Saud Shaik, *Study in Muslim Philosophy*, (India: Adam Publishers and Distribution, 1994), h. 75.

⁸Poerwantana (et.all), *Seluk Beluk Filsafat Islam*, Tjun Surjaman (ed), (Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya, 1994), h. 82.

⁹Philip K. Hitti, *op. Cit.*, edisi 9, (London: The Mac Milan Press Ltd, 1974), h. 32.

Dan salah satu pemikiran al-Farabi adalah tentang *al-Madînah al-Fâdlilah* yaitu negara sempurna atau utama yang terbentuk karena semua organ dan anggota tubuh bekerjasama sesuai dengan tugas masing-masing. Seluruh organ tersebut terkoordinir dengan baik demi kebaikan dan kesejahteraan masyarakat dalam naungan pemimpin yang arif.¹⁰ Jadi, al-Farabi merupakan generasi emas yang banyak menyumbangkan ide-ide brilian untuk kemajuan negara.

Selain al-Farabi, ada tokoh muslim lain yang mempunyai konsep kenegaraan, yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah ilmuwan besar dalam bidang filsafat dan kedokteran. Ia sangat disegani dan mendapat tempat istimewa dalam sejarah perjalanan dan perkembangan filsafat hingga abad modern ini. Tidak hanya al-Farabi yang mendapat peringatan 1000 tahun wafatnya, melainkan juga Ibnu Sina. Pada tahun 1370 H/1951 M, di Mesir mengadakan peringatan 1000 tahun Ibnu Sina dengan menyiarkan teori tentang politik kenegaraan dan kemasyarakatan. Bahkan, genap 1000 tahun wafat Ibnu Sina juga didirikan suatu badan yang bernama *Zikrâ Ibnu Sînâ* artinya kenangan Ibnu Sina. Buku pertama terbitan *Zikrâ Ibnu*

¹⁰Munawir Sjadzali, *op. Cit.*, h. 53.

Sînâ adalah *al-Nâhiah al-Ijtimâ'iyah wa as-Siyâsah fî Falsafah Ibnu Sina* yang ditulis oleh Muhammad Yusuf Musa, Professor Hukum Islam, Cairo.¹¹

Hasrat dunia untuk memperingati 1000 tahun atas meninggalnya Ibnu Sina merupakan penghargaan karena jasa-jasa Ibnu Sina di dalam berbagai lapangan ilmu pengetahuan, terutama filsafat dan kedokteran. Namun, sedikit sekali pembahasan mengenai ilmu kenegaraan Ibnu Sina. Padahal, Ibnu Sina adalah filsuf yang pernah terlibat langsung di dalam pemerintahan pada saat itu. Meskipun secara praktik Ibnu Sina telah gagal, tapi ia bersinggungan langsung dengan para politikus pada zaman dahulu. Dengan demikian, Ibnu Sina adalah seorang politikus yang berteori dan berpraktek.¹²

Ibnu Sina telah membangun sistem filsafat Islam dengan sempurna dan terperinci. Dengan ketajaman otaknya, ia dapat menguasai filsafat dan berbagai cabangnya, walaupun ia harus menunggu saat yang tepat untuk menyelami ilmu metafisika Aristoteles, meskipun ia telah membacanya 40-an kali. Setelah ia membaca buku *Agrad Kitab Ma'wara' al-*

¹¹Zainal Abidin Ahmad, *Negara Adil Makmur menurut Ibnu Sina*, cetakan 1, (Bulan Bintang: Jakarta, 1974), h. 34.

¹²*Ibid*, h. 17.

Thabi'ah li Aristû karya al-Farabi, seakan-akan semua persoalan telah ditemukan jawabannya dengan terang benderang. Ia bagaikan mendapat kunci bagi segala simpanan ilmu metafisika. Hal inilah yang membuatnya dengan tulus mengakui dirinya sebagai murid yang setia dari al-Farabi.¹³ Dan ini juga memberi bukti bahwa Ibnu Sina adalah seorang pewaris tulen tradisi filsafat Islam rintisan al-Kindi dan peletakkan fondasi al-Farabi.¹⁴

Ibnu Sina yang menyandang predikat *al-Syaikh al-Ra'is* (Kiai Utama).¹⁵ Setiap kata dari *al-Syaikh al-Ra'is* mempunyai arti sendiri. Ahmad Fuad Ahwani yang mengarang buku dengan judul “Ibnu Sina” pada tahun 1958, dan pengarang kedua adalah Taysir Syayh ul Ardhi dengan buku yang sama pada tahun 1962. Kedua tokoh ini mengatakan bahwa gelar *as-Syaikh* adalah untuk menunjukkan kegiatannya dalam ilmu pengetahuan dan filsafat. Sedangkan gelar *ar-Ra'is* adalah untuk menunjukkan kegiatannya dalam politik dan

¹³Thawil Akhyar Dasuki, *Sebuah Kompilasi Filsafat Islam*, cet. ke-1, (Semarang: Dina Utama, 1993), h. 34.

¹⁴Budhy Munawar-Rachman, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid; Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban*, Vol. II, (Jakarta: Mizan, 2006), h. 936

¹⁵Lihat Arthur Hyman & James J. Wals, *Philosphy in the Middle Ages*, (New York: Publish by happer, 1969), h. 236.

kedudukannya dalam memegang jabatan perdana menteri.¹⁶ Jadi, tepat sekali jika ada kajian politik Ibnu Sina yang memang belum pernah dibahas sebelumnya dalam satu kajian yang utuh. Ibnu Sina mempunyai konsep tentang negara yang dikenal dengan konsep negara adil makmur.

Secara tegas, Negara Adil Makmur Ibnu Sina mengatakan bahwa kepala pemerintahan berasal dari kepala keluarga, yang memiliki sifat kebapakan. Dari sini, Ibnu Sina sudah mulai menanamkan prinsip kerakyatan sejak dini. Dengan demikian, berdasarkan prinsip kerakyatan, maka Ibnu Sina membangun politik kerakyatan dan ekonomi kerakyatan.¹⁷

Kedua tokoh ini terpengaruh pemikiran Plato dan Aristoteles. Namun, al-Farabi dan Ibnu Sina tidak menjiplak pemikiran Plato dan Aristoteles secara keseluruhan, sebab mereka memadukan teori-teori kenegaraan itu dengan prinsip-prinsip di dalam Islam. Ibnu Sina sangat mengagumi pemikiran-pemikiran gurunya, yaitu al-Farabi. Al-Farabiyang merupakan filsuf Islam *Par Excellence* menjadi tumpuan bagi

¹⁶Ahmad Fuad al-Ahwani, *Ibnu Sina*, (Cairo: Dar Byblion, 1952), h. 19.

¹⁷Zainal Abidin Ahmad, *op.Cit.*, h. 21.

generasi pemikir setelahnya termasuk Ibnu Sina. Tapi, al-Farabi tidak pernah terlibat dalam kancah perpolitikan secara langsung, sedangkan Ibnu Sina pernah menjadi administrator daerah pada 390 H = 1000 M, perdana menteri di Hamadhan sampai sebagai penguasa tertinggi.¹⁸ Dengan demikian perbandingan ini akan menjadi sangat menarik, sebab dua tokoh tersebut terpengaruh dari filsuf yang sama, akan tetapi kedua tokoh itu memiliki pengalaman yang berbeda.

Dari penjelasan-penjelasan di atas, maka sangat penting kajian tentang pemikiran politik al-Farabi dan Ibnu Sina, baik dalam konteks sejarah politik Islam maupun dalam penerapan konsep bernegara dalam Islam. Sebab, mereka adalah dua tokoh yang sangat berpengaruh karena pemikiran-pemikirannya yang sangat brilian.

Kajian politik Islam sangatlah penting sebagaimana pendapat Nurcholis Madjid:

“Dalam kaitannya dengan masalah politik, kaum muslimin biasa mengatakan bahwa agama Islam berbeda dengan banyak agama yang lain. Pernyataan yang sering muncul secara stereotipikal itu memang mengandung suatu hal yang sama berarti mengingkari

¹⁸ *Ibid.*, h.106-107.

kenyataan sejarah yang telah berlangsung selama lebih dari empat belas abad dan akan berlangsung sampai berapa abad lagi. Berarti sama dengan mengingkari sebagian esensi dari agama Islam.”¹⁹

Senada dengan itu, pendapat Marshall G. S. Hodgson, sebagaimana yang dikutip oleh Nurcholis Madjid juga mengatakan:

“Melihat keseluruhan sejarah Islam sebagai *venture* atau usaha tidak kenal berhenti untuk mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan, dan *venture* itu melibatkan orang-orang muslim dalam praktek semua bidang kegiatan hidup, dengan sendirinya termasuk politik.”²⁰

Menurut Smith, sudah seharusnya umat Islam melakukan kajian tentang konsep-konsep kenegaraan agar dapat menemukan hal baru, sehingga bisa memberikan sumbangsih pemikiran kepada generasi mendatang dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan umat Islam. Dengan demikian, umat Islam dapat memberikan sesuatu yang berharga dan bermanfaat bagi politik Islam maupun politik seluruh umat manusia. Dia juga menyatakan kekuatan yang diperoleh orang-orang Arab dari sikap pasrah kepada kekuatan

¹⁹Munawir Sjadzali, *op. Cit.*, h. v.

²⁰*Ibid.*, h. v-vi.

transendental itu sedemikian dahsyatnya, sehingga antara lain menghasilkan ledakan politik yang paling spektakuler dalam sejarah umat manusia. Kata Smith: “*Submission (in Arabic, Islam) was the very name of the religion that surfaced through the Koran, yet its entry into history occasioned the greatest political explosion the world has known*”²¹ (*Ketundukan (dalam bahasa arab, Islam) adalah nama sebuah agama yang muncul melalui al-Qur’an, di dalam sejarah dan menyebabkan politik menjadi besar yang menguasai dunia*). Maka dari itu, sudah seharusnya kaum muslimin memahami sejarah dan tahu apa yang harus dilakukan dalam rangka mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan di masa depan yang lebih kompleks.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam skripsi ini, penulis akan menyusun skripsi dengan judul “**Konsep Negara Ideal (Studi Komparasi antara al-Farabi dan Ibnu Sina)**”.

²¹Ibid., h. Vi. Bandingkan: Huston Smith, *Beyond the Post-Modern Mind*, (New York: Crossroad, 1982), h. 141.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep Negara Ideal menurut al-Farabi dan Ibn Sina?
2. Apa Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Al-Farabi dan Ibnu Sina tentang Negara Ideal?
3. Bagaimana Relevansi Konsep Negara Ideal al-Farabi dan Ibnu Sina dengan Politik di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mendiskripsikan dan menjelaskan pemikiran Al-Farabi dan Ibnu Sina tentang Negara Ideal
2. Mengidentifikasi Corak Pemikiran antara al-Farabi dan Ibnu Sina
3. Melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap pemikiran al-Farabi dan Ibnu Sina, sehingga penulis

dapat merelevansikan konsep negara dari kedua tokoh dengan politik di Indonesia

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pandangan-pandangan al-Farabi dan Ibnu Sina tentang teori kenegaraan
2. Menambah perspektif baru atau khazanah intelektual tentang teori kenegaraan dari filsuf muslim, yaitu al-Farabi dan Ibnu Sina
3. Memberikan kontribusi pemikiran sebagai wacana dan referensi, sehingga menjadi bahan pertimbangan bagi warga negara Indonesia untuk memperbaiki kondisi negara

D. Tinjauan Pustaka

Beberapa kajian tentang al-Farabi yang membahas politik atau kenegaraan antara lain:

Pertama, *Negara Utama* yang ditulis oleh Zainal Abidin Ahmad pada tahun 1968. Di dalam buku ini, penulis menggambarkan Negara Utama menurut al-Farabi dan buku ini menjelaskan teori kenegaraan al-Farabi yang diambil dari kitab

'Ârâ ahl al-Madînah al-Fâdlilah. Selain itu, Ahmad juga mengomentari negara utama menurut al-Farabi.

Kedua, skripsi tentang Konsep Kepemimpinan dalam Negara Utama al-Farabi yang ditulis oleh Muhammad Fanshobi, seorang mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Ushuluddin, jurusan Aqidah-Filsafat. Skripsi ini membahas kriteria kepemimpinan dan konsep negara utama al-Farabi yang dikaitkan dengan al-Qur'an dan Hadits. Contoh: teori organisme al-Farabi yang sesuai dengan Hadits bahwa negara dianalogikan dengan tubuh manusia yang sehat dan sempurna.

Ketiga, *Filsafat Politik Islam: Antara al-Farabidan Khomeini* yang ditulis oleh Yamani. Buku ini menjelaskan tentang perbandingan pemikiran filsafat politik al-Farabi dan Khomeini yang memiliki tujuan untuk mencari tahu adanya konsep wilâyah al-Fâqih pemikiran Ayatullah Khomeini dalam pemikiran al-Farabi. Di dalam buku ini, mereka membahas tentang seorang pemimpin yang dianggap *ma'sûm* yang berkedudukan sebagai kepala negara serta kepala agama.

Keempat, karya Zainal Abidin Ahmad tentang *Negara Adil Makmur Menurut Ibnu Sina*. Zainal Abidin mengatakan

bahwa buku ini belum mampu menjelaskan secara sistematis dan komprehensif tentang Negara Adil Makmur menurut Ibnu Sina. Buku ini membahas tentang aspek-aspek yang harus diatur dalam undang-undang untuk menjadikan negara menjadi Adil dan Makmur. Namun, kekurangan buku ini hanya memberikan poin-poin singkat tentang Negara Adil Makmur. Jadi, harus diupayakan lagi untuk menganalisis dan menjelaskan secara detail tentang konsep Negara Adil Makmur menurut Ibnu Sina. Sedangkan, sedikit sekali sarjana yang membahas tentang teori kenegaraan Ibnu Sina, bahkan penulis baru menemukan satu karya, yaitu Buku *Negara Adil Makmur menurut Ibnu Sina*.

Untuk mengetahui pemikiran al-Farabi dan Ibnu Sina, maka penulis akan mengkaji secara langsung karya mereka, khususnya karya yang berkaitan dengan pemikiran mereka mengenai negara ideal. Sesuatu yang tidak bias dilepaskan dalam mengkaji pemikiran kedua tokoh ini adalah latar belakang mereka tumbuh. Sebab, dari mengetahui latar belakang mereka tumbuh, maka akan diketahui kondisi lingkungan yang menjadikan mereka mencetuskan konsep kenegaraan.

Kondisi sosio-kultur dari kedua tokoh ini sangat berbeda, sehingga dari situlah muncul perbedaan konsep dari mereka berdua. Al-Farabi(w. 339 H/950 M) sebagai ilmuwan besar hampir sepenuhnya terbenam dalam kecintaannya menguasai ilmu secara komprehensif, sehingga, dia yang saat itu hidup pada zaman khalifah Abbasyiah tidak dekat dengan penguasa saat itu. Dia menyibukkan diri untuk mendalami ilmu dan menjadikannya dalam tulisan. Karyanya tergolong banyak dan fenomenal. Muanawir Sjadzali dalam bukunya *Islam dan Negara* memberikan komentar bahwa dari kondisi al-Farabi(w. 339 H/950 M) saat itu yang tidak dekat dengan penguasa dan tidak pula menduduki jabatan pemerintahan, di satu sisi merupakan keuntungan dan di sisi lain merupakan kerugian. Keuntungannya, karena al-Farabi(w. 339 H/950 M) tidak dekat dengan penguasa, maka dia mempunyai kebebasan dalam berfikir tanpa harus menyesuaikan gagasannya tentang negara dengan pola politik pemerintahan saat itu. Dan merupakan kerugian, oleh karena dia tidak mempunyai peluang untuk belajar dari pengalaman dalam mengatur Negara. Selain itu dia

tidak bisa menguji kebenaran dari teorinya tentang Negara dengan fakta-fakta politik yang terjadi pada zamannya.²²

Berbeda dengan Ibnu Sina yang merupakan abdi pemerintahan saat itu. Selain dia sebagai ilmuwan, dia juga menduduki jabatan pemerintahan pada zamannya, sehingga, hal itu sangat mempengaruhi pemikirannya mengenai konsep kenegaraan.²³

Ibnu Sina meyakini bahwa masalah ekonomi merupakan hal terpenting untuk melakukan revolusi sosial. Zainal Abidin Ahmad dalam bukunya *Negara Adil Makmur menurut Ibnu Sina* menuliskan bahwa Ibnu Sina belajar dari sejarah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. sampai pada pemerintahan Abbasyiah sehingga ia mengetahui bahwa pembentukan masyarakat dimulai Nabi dengan memperbaiki perekonomian umat Islam yang saat itu masih sedikit jumlahnya. Kaum Anshar yang tergolong dari kelas menengah ke atas dipersatukan dengan kaum muhajirin yang tergolong kaum menengah ke bawah dalam hukum persaudaraan yang terkenal dengan peristiwa *Muakhah Islamiyah* (*the*

²²Munawir Sjadzali, *op. Cit.*, h. 50.

²³*Loc. Cit.*, h.

brotherhood of islam). Setelah negara Islam berdiri, mulailah negara mencampuri sistem perekonomian dengan menetapkan zakat bagi semua kaumnya yang itu juga merupakan rukun Islam ke-tiga. Orang yang mampu diwajibkan memberikan zakatnya 2,5-10 % dari kekayaan untuk dibagikan kepada fakir miskin.²⁴ Kondisi ekonomi masyarakat Islam sejak dipimpin Nabi Muhammad hingga pertengahan kekhalifahan Utsman begitu harmonis. Namun, setelah Utsman bin Affan(656 M) mengeluarkan kebijakan melepaskan campur tangan negara atas ekonomi menjadikan sistem perekonomian yang harmonis menjadi goncang ditandai dengan munculnya gerakan sosialis Islam yang dipelopori oleh Abu Dzarr al Giffari, sehingga karena pemberontakan itu, Abu Dzarr dikenai hukuman pengasingan.²⁵

Dari latar belakang sejarah itulah, Ibnu Sina menyimpulkan bahwa kemajuan negara harus dimulai dari revolusi ekonomi. Sebab, dengan perekonomian yang mapan, maka negara akan mampu mensejahterakan masyarakat.

²⁴Zainal Abidin Ahmad, *Negara Adil Makmur Menurut Ibnu Sina*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 11.

²⁵*Ibid*, h. 99.

Dengan menggunakan buku-buku pendukung tersebut diharapkan akan mampu mendapatkan data yang memadai untuk penyusunan skripsi dengan pokok permasalahan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa aspek, yaitu:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif,²⁶ dengan bentuk studi deskriptif-analisis melalui pendekatan *library research*²⁷ yaitu penelitian yang objek utamanya literatur baik buku, jurnal, maupun artikel, sehingga data yang diperoleh dari literatur tersebut relevan dengan pokok permasalahan.

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun skripsi ini dengan menggunakan penelitian

²⁶Deskripsi singkat mengenai penelitian kualitatif dapat dilihat dalam Anselm Straose and Juliet Corbien, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif; Prosedur Teknik dan Teori Grounded*, (terjemahan Junaidi Ghoni), (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), h. 11.

²⁷Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: UGM Pers, 1980), h.

ke pustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan data-data dari buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan untuk dikaji secara mendalam. Metode yang digunakan adalah metode dokumentasi dan datanya disebut data literatur.

3. Data Primer

Data primer berupa buku yang ditulis al-Farabi yang berjudul '*Arâ Ahl al-Madînah al-Fâdlilah* (dasar-dasar ideologi warga negara utama). Kemudian, buku karya Ibnu Sina yang berjudul *as-Syifâ*. Buku-buku tersebut merupakan curahan ide untuk mewujudkan negara ideal dari al-Farabi (w. 339 H/950 M) dan Ibnu Sina.

4. Data Sekunder

Data sekunder pembuatan skripsi ini berupa buku-buku yang berkaitan dengan konsep Negara ideal. Buku tersebut sebagai penunjang pemikiran al-Farabi dan Ibnu Sina mengenai negara ideal.

5. Metode Analisis

Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis, yaitu metode yang ditempuh untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti atau cara penanganan terhadap obyek ilmiah tertentu dengan jalan memilah-milah antara satu pengertian dengan pengertian lain.²⁸

Jika data sudah terkumpul, maka akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode komparatif. Komparasi ini akan menentukan sisi persamaan dan perbedaan antara kedua tokoh. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan tentang karakteristik pemikiran dari kedua tokoh.

F. Sistematika Penulisan

Agar skripsi ini lebih mudah untuk dipahami, maka diperlukan sistematika penulisan yang jelas dan runtut. Oleh sebab itu, skripsi ini terbagi dalam lima bab.

²⁸Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: P.T. Raja Grafindo, 1997), h. 59.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, terkait dengan alasan peneliti menulis judul skripsi ini, kemudian pokok masalah, yang menjadi permasalahan untuk diteliti. Kemudian tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas pemikiran al-Farabi tentang konsep negara ideal. Ada dua sub bab di dalamnya. Sub bab pertama membahas mengenai biografi al-Farabi yang terdiri dari latar belakang pemikiran dan karya-karya al-Farabi. Sub bab kedua membahas mengenai konsep al-Farabi tentang negara ideal yang terdiri dari asal mula negara. Konsep negara ideal, dan kepala negara.

Bab tiga membahas pemikiran Ibnu Sina tentang konsep negara ideal. Ada dua bab di dalamnya. Bab pertama membahas tentang biografi Ibnu Sina yang terdiri dari latar belakang pemikiran dan karya-karya Ibnu Sina. Sub bab kedua membahas tentang konsep Ibnu Sina tentang negara ideal yang terdiri dari asal mula negara, konsep negara ideal dan kepala negara.

Bab empat merupakan analisis terhadap pemikiran al-Farabi dan Ibnu Sina tentang konsep negara ideal. Pada bab ini akan diidentifikasi corak pemikiran kedua tokoh, sehingga dapat ditemukan persamaan dan perbedaan konsep negara ideal antara al-Farabi dan Ibnu Sina. Selain itu, dalam bab ini akan membahas tentang relevansi pemikiran al-Farabi dan Ibnu Sina dengan Politik di Indonesia.

Bab lima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan seluruh rangkaian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dan sekaligus merupakan jawaban dari pokok permasalahan. Pada bab ini juga, terdapat saran-saran dari penulis.

BAB II

PEMIKIRAN AL-FARABI TENTANG KONSEP NEGARA IDEAL

A. Biografi al-Farabi

1. Pendidikan dan Karir al-Farabi

Al-Farabi mempunyai nama lengkap Abu Nashr Muhammad ibn Tarkhan ibn al-Uzalagh al-Farabi lahir 257-339 H atau 870-950 M²⁹ di Wasij di Distrik Farab (sekarang bernama Atrar, di Transoxiana),³⁰ sebuah kota yang mayoritas penduduknya mengikuti madzhab Syafi'iyah. Sedangkan, ia wafat di Damaskus pada 950 M atau 339 H/950 M.³¹ Di kalangan masyarakat Eropa, ia lebih dikenal dengan nama al-Farabius, dan juga dengan nama Avenasser. Ayahnya adalah seorang opsir tentara keturunan Persia yang mengabdikan kepada pangeran-pangeran Dinasti Samaniyah. Sedangkan, ibunya

²⁹Lihat Ensiklopedi Islam(Ringkasan), (P.T. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1996), hlm. 86.

³⁰Abu Nashr al-Farabi, *Ârâ Ahl al-Madînah al-Fâdlilah*, (Libanon: Dâru al-Masyriq, 2000), hlm. 1.

³¹Yamani, *op. Cit.*, h. 51.

keturunan atau dari kebangsaan Turki. Dari silsilah dapat diketahui bahwa al-Farabi adalah keturunan keluarga terhormat. Ini dapat diketahui dari nama kakeknya Tarkhan, yang dalam bahasa Turki bukan hanya menunjukkan nama pejabat militer, namun juga menunjukkan keistimewaan dan hak-hak feodal tertentu. Al-Farabi menempuh pendidikan dasar di Farab, kota kelahirannya. Ia mempelajari al-Qur'an, tata bahasa, kesusastraan, ilmu-ilmu agama, dan matematika dasar. Sejak muda, ia terkenal mempunyai bakat yang luar biasa dalam belajar bahasa. Konon dia dapat berbicara dalam tujuh puluh macam bahasa, yang pasti dia menguasai secara penuh empat bahasa, yaitu Arab, Persia, Turki, dan Kurdi. Ia melanjutkan pendidikan di Bukhara, ibu kota dan pusat intelektual. Di sinilah al-Farabi belajar bahasa, budaya, musik, dan filsafat Persia. Pada saat al-Farabi menggali ilmu di Baghdad, kota yang dianggap sebagai pemilik ahli waris utama tradisi filsafat dan kedokteran Alexandria. Salah satu sumbangan terpenting al-Farabi pada dunia intelektual Baghdad adalah ia bersama para

guru logikanya membentuk salah satu rantai paling awal antara filsafat Yunani dengan dunia Islam.³²

Pada tahun 300 H/910 M, ia berangkat ke kota Baghdad sebagai ibu kota pusat ilmu pengetahuan. Di Baghdad, al-Farabi belajar bahasa arab kepada Abu Bakar Sarraj. Di samping itu, dia juga belajar ilmu falsafah dan ilmu logika kepada sarjana kristen, Abu Basyr Matta bin Yunus(w. 940 M), seorang penerjemah buku-buku Aristoteles dan filosof-filosof Yunani lainnya.³³

Kurang dari 10 tahun, dia tinggal di Baghdad untuk belajar dan mengajar. Karena dia belum puas, maka dia belajar falsafah kepada Mattius, Uskup, Isra'il, Quwayri.³⁴ Maka, pada 310 H/920 M, dia berangkat ke Harran, salah satu pusat kebudayaan Yunani di Asia kecil, untuk meneruskan pengetahuannya kepada filosof Kristen, yaitu

³²Ibrahim Madzkour, "Al-Farabi" dalam M. M. Sharif (ed.), *A History of Muslim Philosophy*, Vol. I (Delhi: Low Price Publication, 1961), h. 221.

³³MM. Syarif, *A History of Muslim Philosophy*, (Weisbaden: Otto Harrassowitz, 1963), hlm. 451.

³⁴Majid Fakhry, *Al-Farabi: Founder of Islamic Neoplatonism: His Life, Works and Influence*, Great Islamic Thinkers (Oxford: Oneworld, 2002), hlm. 2.

Yuhana Ibnu Hailan. Dibawah bimbingan Yuhana Ibnu Hailan(w. 910 M), al-Farabi mendalami filsafat³⁵.

Hampir 20 tahun al-Farabi tinggal di Harran untuk belajar, mengajar, dan mengarang. Di sinilah al-Farabi mulai mengarang buku-buku, sehingga terangkat derajatnya sebagai Muslim yang memiliki tingkat ilmu pengetahuan tinggi.

Aktivitas pasti al-Farabi di Baghdad sama seperti di Harran, sehingga di Baghdad pun dia mendapat reputasi sebagai filosof muslim terkemuka.³⁶ Al-Farabi benar-benar konsentrasi dengan aktivitasnya, sehingga dia tidak terjun dalam politik praktis. Padahal, pada waktu itu terjadi gejolak politik yang dahsyat di Baghdad. Kemudian, pada tahun 330 H /940 M al-Farabi pindah ke Damaskus. Al-Farabi hanya tinggal selama dua tahun di Damaskus, kemudian dia mendapat panggilan dari putra

³⁵Majid Fakhry, *A History of Islamic Philosophy*, edisi 2, (New York: Columbia University Press, 1983), hlm. 108.

³⁶Osman Bakar, *Hierarki; Membangun Rangka Pikir Islamisasi Ilmu menurut al-Farabi, al-Ghazali, dan Qutb al-Din al-Siraji*, cetakan 1, terjemahan Purwanto, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 34.

mahkota Dinasti Hamdaniyyah oleh Saif ad-Daulah. Karena kekaguman putra mahkota terhadap kepandaian al-Farabi, maka Saif al-Daulah mengangkat al-Farabi menjadi ulama' istana. Selama menjadi ulama' istana, al-Farabi mendapat gaji yang besar. Namun, al-Farabi tetap hidup sederhana dengan mencukupkan uang empat dirham setiap hari. Bahkan, dia memberikan tunjangan itu kepada fakir miskin. Hampir 10 tahun, al-Farabi pulang pergi antara Damaskus ke Aleppo.

Datanglah saat yang tragis, yaitu hubungan memburuk antara pembesar Damaskus dan Kepala Daerah Aleppo. Akhirnya, Saif al-Daulah memutuskan akan menyerang kota Damaskus. Di dalam perjalanan ke Damaskus, Saif al-Daulah mengajak al-Farabi sebagai penasehat pribadinya. Namun, nasib malang menimpa al-Farabi. Tidak lama kemudian, setelah Damaskus dikalahkan oleh Saif al-Daulah, al-Farabi meninggal dunia pada bulan Rajab 339 H atau Desember 950 M, dalam usia 80 tahun di Damaskus. Sungguh, al-Farabi memiliki keahlian dalam banyak bidang, salah satunya adalah dia memahami filsafat secara utuh. Sebagai bukti, dia mampu

mengakhiri kontradiksi antara pemikiran Plato dan Aristoteles dalam sebuah buku *Al-Jam'u baina Ra'yay Al-Hakimain Aflathun Wa Aristhu*.

Banyak Intelektual Muslim yang menganggap bahwa al-Farabi adalah pemikir besar kedua setelah Aristoteles, maka dia mendapat julukan Maha Guru Kedua (*Second Preceptor*). Diantara faktor-faktor yang menyebabkan al-Farabi mendapat julukan *Mu'alimal-Tsani* adalah; Pertama, al-Farabi memiliki kemampuan lebih dalam bidang logika dibanding gurunya, Abu Basyr Matta bin Yunus. Kedua, al-Farabi mampu menerjemahkan buku-buku dan mengulas pemikiran-pemikiran Aristoteles, sehingga generasi penerus dapat menjelajahi imajinasi Aristoteles pada zaman dahulu. Ketiga, karena al-Farabi mencetuskan banyak teori filsafat Islam, bahkan lebih lengkap dibanding pendahulunya, yaitu al-Kindi (w. 873 M).³⁷ Sehingga, ide-ide al-Farabi menyumbangkan kekayaan khazanah intelektual Islam bagi generasi berikutnya.

³⁷Poerwantana, *Seluk Beluk Filsafat Islam*, diterjemahkan oleh TjunSurjaman, (Bandung: P.T. RemajaRosdakarya, 1994), hlm. 82.

Al-Farabi hidup pada masa pemerintahan Abbasiyah yang sedang mengalami kegoncangan politik yang luar biasa. Pemerintah pusat Abbasiyah di Baghdad berada dalam kekacauan di bawah tekanan para diktator, yaitu pada zaman khalifah Mu'tamid (869-892 M) dan meninggal pada masa pemerintahan Khalifah Al-Muthi' (946-974 M). Suatu periode paling kacau dan tidak ada stabilitas politik sama sekali. Pada waktu itu, timbul banyak macam tantangan, bahkan pemberontakan terhadap kekuasaan Abbasiyah dengan berbagai motif: Agama, kesukuan, dan kebendaan.

Diperkirakan erat kaitannya dengan situasi politik yang demikian kisruh, al-Farabi menjadi gemar berkhawatir, menyendiri dan merenung. Ia merasa terpanggil untuk mencari pola kehidupan bernegara dan bentuk pemerintahan yang ideal. Pada saat al-Farabi mengalami kondisi demikian, ia berkenalan dengan pemikiran Filsafat Yunani, seperti Plato dan Aristoteles. Al-Farabi belajar ilmu falsafah dan ilmu logika kepada sarjana Kristen, Abu Bisyr Matta bin Yunus, seorang penerjemah buku-buku Aristoteles dan filosof-filosof

Yunani lainnya. Sehingga, al-Farabi juga ikut menerjemahkan karya-karya Plato dan Aristoteles. Dalam proses penerjemahan, al-Farabi juga mengomentari karya-karya Plato dan Aristoteles. Sehingga, pemikiran mereka terinternalisasi dalam pikiran al-Farabi. Jadi, sangat logis jika al-Farabi terpengaruh oleh pemikiran Plato dan Aristoteles dalam karyanya. Namun, kehebatan al-Farabi adalah mampu mengkombinasikan ide atau pemikiran-pemikiran Yunani Kuno dengan pemikiran Islam untuk menciptakan sebuah negara yang ideal (Negara Utama).

2. Karya-Karya

Ârâ Ahl al-Madînah al-Fâdlilah (Dasar-dasar Ideologi Warga Negara Utama) merupakan kitab yang diterjemahkan oleh Richard Walzer dengan judul *Al-Farabi On The Perfect State* Leiden, 1895 M. Menurut Ibnu Abi Usaibi'ah, kitab ini mulai ditulis al-Farabi pada waktu dia di Baghdad kemudian dia bawa ke Syam pada akhir 330 H. Buku ini baru selesai dengan pembagian bab dan pasalnya pada tahun 337 H di Mesir. Jadi, kitab *Ârâ Ahl al-Madînah al-Fâdlilah* selesai dalam waktu tujuh tahun. *Siyâsah al-Madaniyyah* (Politik Ekonomi), buku ini sudah diterjemahkan oleh Moses ben

Tebon dalam bahasa Hebrew di London, 1850 M. Kitab dinamakan juga *Mabâdî al-Maujûdât* (Dasar-dasar segala wujud) telah dicetak di Heidar Abad, India, pada tahun 1346 H. *Tahsîl as-Sa'âdah* (Merealisasikan Tujuan Kebahagiaan), kitab ini berisi pembahasan mengenai usaha-usaha untuk mencapai tujuan negara. Kitab ini telah dicetak Heyder Abad pada tahun 1345 H. *Jawâmi' as-Siyâsah* (Himpunan Politik), kitab ini diterjemahkan oleh Shaiko dari manuskripnya yang masih tersimpan di Vatikan. *Risâlah fî as-Sa'âdah* (Risalah tentang Jalan Menuju Kebahagiaan) Diterjemahkan ke dalam Bahasa Ibrani. *'Ulûm al-Ta'alim* (Ilmu-ilmu Matematika), *At-Thabi'i* (Ilmu Alam), *Theologi / Al-Ilâhi* (Ilmu Ketuhanan), *Sharh al-Fârâbî li-Kitâb Aristûtâlîs fî al-Ibârah* Beirut, 1960 ed. W. Kutsch and S. Marrow, *Al-Fahs al-Madanî* (penyelidikan rencana pembangunan). *Jawâmi' as-Sayr al-Mardiyyah fî Iqtifâ' al-Fadhâil al-Insîyyah* (himpunan akhlak-akhlak yang baik dalam mengikuti sifat-sifat keutamaan manusia. *As-Sîratu al-Fâdhilah* (Akhlak Utama), kitab ini pernah dipujikan sebagai puncak karangan al-Farabi di lapangan akhlak.

A. Pemikiran al-Farabi tentang Negara Ideal

1. Asal Mula Negara

Sebelum al-Farabi membicarakan tentang negara, terlebih dahulu dia membahas asal usul negara. Salah satu elemen terbentuknya negara adalah manusia, maka al-Farabi memulai dengan pembahasan manusia. Plato menjelaskan bahwa manusia secara natural adalah makhluk politik karena fitrahnya tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri kecuali melalui perkumpulan atau kelompok.³⁸ Sedangkan menurut Aristoteles bahwa manusia adalah *zoon politicon*, makhluk yang bermasyarakat dan bernegara untuk mencapai kesempurnaan sebagai manusia.³⁹

Sebagaimana yang terdapat dalam karya fenomenal al-Farabi *Ârâ' Ahl al-Madînah al-Fâdlilah* bahwa negara muncul dari sekumpulan manusia. Manusia saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang disebut al-Farabi dengan Asosiasi (*al-Ijtimâ'at al-Insâniyah*). Manusia tidak akan mendapatkan

³⁸Fauzi M. Najjar, "Democracy In Islamic Political Philosophy" dalam Jurnal Studia Islamica, La Loi du, 1957, G.P Maisonneuve et Larose, 1980, hal. 108-122.

³⁹Noer, *Pemikiran Politik*, (Jakarta: P.T. Pembangunan, 1965), h. 28.

kesempurnaan dan kebahagiaan, kecuali melalui asosiasi dengan berkerjasama dan berkumpul. Menurut al-Farabi manusia termasuk makhluk yang tidak dapat menyelesaikan urusan-urusan penting mereka, ataupun mencapai kondisi terbaik mereka, kecuali melalui asosiasi (perkumpulan) banyak kelompok dalam suatu tempat tinggal yang sama.⁴⁰ Hal inilah menjadi awal terbentuknya negara. Al-Farabi beranggapan bahwa negara lahir atas kesepakatan bersama dari sekumpulan manusia yang saling membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup.⁴¹

Menurut al-Farabi, manusia tidak dapat menyelesaikan urusan-urusannya sendiri, sebab manusia membutuhkan pertimbangan dari orang lain untuk mencapai keadaan yang baik. Jadi, manusia membutuhkan asosiasi (perkumpulan) dalam suatu tempat tinggal yang sama.⁴² Psikologi manusia menurut al-Farabi mempunyai fitrah sosial, fitrah untuk berhubungan dan hidup bersama orang lain, dari fitrah ini kemudian lahir apa yang disebut

⁴⁰Yamani, *op. Cit*, h. 60.

⁴¹Abu Nashr al-Farabi, *Ârâ' Ahl al-Madînah al-Fâdlilah*, (Beirut: Daar al-Masyriq, 2000), Cet. 2. h. 117.

⁴²Yamani, *Al-Farabi Filosof Politik Muslim*, (Jakarta: Teraju, 2005), h. 37.

masyarakat, kota dan negara.⁴³ Sifat dasar inilah yang mendorong manusia untuk hidup bermasyarakat dan bernegara.

Secara fitrah, manusia akan hidup bermasyarakat. Sebab, untuk mempertahankan hidup, manusia membutuhkan sandang, pangan, dan papan. Untuk memenuhinya, tidak mungkin manusia hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Sehingga meniscayakan manusia untuk hidup berkelompok.⁴⁴

Al-Farabi sangat memperhatikan masyarakat dalam membangun konsep kota utama. Bahkan, ia membagi masyarakat kedalam dua kelompok besar, yakni masyarakat sempurna dan tidak sempurna. Masyarakat sempurna adalah masyarakat kelompok besar, bisa berbentuk masyarakat kota, ataupun masyarakat yang terdiri dari beberapa bangsa yang bersatu dan bekerja sama secara internasional. Masyarakat yang sempurna dibagi al-Farabi menjadi tiga jenis, yaitu besar, menengah, dan kecil. Masyarakat sempurna besar (*Kâmilah 'Uzmâ*)

⁴³Frans Magnis Suseno, *Etika Politik*, (Jakarta, Gramedia, 1994), h. 238-239.

⁴⁴Abu Nashr al-Farabi, *Ârâ' Ahl al-Madînah al-Fâdlilah*, *loc. Cit*, h. 117.

adalah kesatuan dari beberapa bangsa yang berkelompok dan bekerja sama antara satu dan yang lain. Sedangkan, masyarakat sempurna menengah (*Kâmilah Wusthâ*) adalah kesatuan suatu bangsa, dan masyarakat sempurna kecil (*Kâmilah Syughrâ*) adalah kesatuan dari masyarakat dalam suatu negara atau kota.⁴⁵

Masyarakat tidak sempurna adalah kesatuan terkecil dari suatu kelompok manusia, seperti: rumah tangga dan desa. Masyarakat ini, secara kuantitas dan kualitas anggotanya kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Al-Farabi menganjurkan untuk saling bekerjasama agar dapat menghilangkan kekurangan dan mewujudkan kesempurnaan.⁴⁶ Sementara yang dikatakan masyarakat yang tidak sempurna adalah masyarakat yang hanya dalam keluarga maupun sedesa dalam lingkup yang lebih kecil. Masyarakat yang terbaik menurut al-Farabi adalah masyarakat yang bekerja sama serta saling bantu untuk mencapai kebahagiaan,

⁴⁵*Ibid.*, h. 117-118.

⁴⁶*Ibid.*, h. 117.

masyarakat yang demikianlah yang dikatakan sebagai masyarakat yang utama.⁴⁷

Menurut al-Farabi negara merupakan satu kesatuan yang paling mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan hidup yang diperlukan manusia seperti, sandang, pangan, dan papan. Masyarakat akan mencapai tingkatnya yang sempurna ketika masyarakat kota yang merupakan sekelompok manusia yang mampu memenuhi kebutuhan mereka dengan saling melengkapi antara satu dan yang lain.⁴⁸ Sebab, pada dasarnya, setiap manusia itu saling membutuhkan antara satu dengan yang lain guna mencapai kesempurnaan hidup. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka saling membantu. Karena banyaknya kebutuhan mereka, sehingga mengharuskan untuk saling melengkapi. Setiap orang bekerja sesuai dengan kompetensinya. Masyarakat bagaikan satu tubuh yang disaat satu anggota tubuh merasa senang, maka senanglah semua. Begitupun sebaliknya, di saat salah satu anggota tubuh merasa sakit, maka sakitlah semuanya. Seluruh

⁴⁷Prof. Dr. H. Sirajuddin Zar, M.A. *Filsafat Islam (Filosof dan Filsafatnya)*, (PT. Raja Grafindo Persada), h. 83.

⁴⁸Zainal Abidin Ahmad, *Negara Utama*, (Jakarta: P.T. Kinta 1968), h. 42.

masyarakat dijalari oleh jiwa yang sama dengan rasa yang sama pula.⁴⁹

Setiap orang dalam masyarakat kota harus menyadari perlunya kerjasama dan koordinasi yang teratur. Jika anggota masyarakat mempunyai kompetensi yang bermacam-macam, maka mereka melakukan pekerjaan sesuai dengan bakat mereka masing-masing.⁵⁰

Menurut al-Farabi, negara utama ibarat tubuh manusia yang sempurna dan sehat.⁵¹ Semua organ tubuh bekerjasama sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Setiap tubuh manusia memiliki sejumlah organ atau anggota badan dengan berbagai fungsi yang berbeda, dan dari sejumlah organ itu terdapat satu organ pokok yang paling penting, yakni jantung. Sebab, jantung berfungsi sebagai organ pengatur yang tidak diatur oleh organ lainnya. Selain jantung, ada organ lain yang tingkat kepentingannya hampir sama dengan jantung, yaitu otak. Otak adalah organ penting kedua di dalam tubuh manusia. Organ tubuh kedua membantu organ tubuh pertama untuk

⁴⁹ Abu Nashr al-Farabi, *Ârâ' Ahl al-Madînah al-Fâdlilah*, op. Cit, h. 94.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 117.

⁵¹ *Ibid.*, h. 118.

mengatur organ-organ tubuh lainnya. Kemudian ada organ tubuh peringkat ketiga yang bertugas untuk melayani organ tubuh peringkat kedua, begitu seterusnya. Jantung menjadi pengatur seluruh organ tubuh manusia, sehingga jika ada salah satu organ tubuh rusak, maka jantung langsung bertindak untuk memperbaiki kerusakan itu.⁵²

Dari sinilah al-Farabi menganggap bahwa perlu mendirikan suatu negara untuk mengatur masyarakat yang mempunyai karakter dan kompetensi yang berbeda-beda. Karena itu, masyarakat membutuhkan ketua atau pemimpin yang bertugas dan berwenang untuk mengatur dan mengarahkan kompetensi yang berbeda itu untuk menuju kesempurnaan hidup.⁵³

Al-Farabi mengibaratkan kota atau negara dengan susunan tubuh manusia yang sehat dan sempurna dimana masing-masing saling berusaha dan bekerjasama, dalam tubuh manusia ada kepala, hati, jantung, tangan, dan kaki yang bekerja sesuai dengan tugasnya. Begitu pula dalam Negara, masing-masing rakyat mempunyai tugas dan

⁵²*Ibid* h. 92-93. Lihat juga h. 118-119.

⁵³Abu Nashr al-Farabi, *op. Cit.*, h. 120. Lihat, Zainal Abidin Ahmad, *op. Cit.*, h. 43.

kadar kecerdasan yang berbeda-beda sehingga membutuhkan saling kerjasama dimana harus ada kepala Negara, dan yang lain membantu dalam berbagai kedudukan sehingga tercapai kebahagiaan.⁵⁴ Gagasan ini sebagaimana diungkapkan oleh Al-Farabi dalam karya-karya penting filsafat politiknya di antaranya, *Al Siyashah Al Madaniyah*, dan *Ârâ' Ahl Al Madînah Al-Fâdlilah*.⁵⁵

Dalam menciptakan negara yang baik (*ideal citizens*). Al-Farabi menyebut beberapa faktor patokan penting untuk menjadi perhatian, yaitu sebagai berikut;

- a. Setiap orang memiliki skill atau kemampuan yang berbeda. Perbedaan kemampuan akan menyebabkan perbedaan kebutuhan pula. Namun, perbedaan itu merupakan hal yang wajar, yang menjadi perhatian adalah semua orang memiliki kepentingan yang sama, yaitu “kemauan keras” untuk memenuhi kebutuhannya. Kemauan itulah yang menjadi dasar terbentuknya negara.

⁵⁴ Abu Nashr al-Farabi, *op. Cit.*, h. 92.

⁵⁵ Ahmad Zainal Abidin, *op.Cit.*, h. 5.

- b. Setiap orang harus mengerahkan segala potensi akalinya untuk mengelola sumber daya yang diciptakan oleh Tuhan. Sehingga, dengan “kecerdasan akal”, setiap orang dapat memenuhi kebutuhannya bahkan kebutuhan orang lain. Dengan demikian, akan tercipta negara yang sejahtera.
- c. Setiap orang harus mempunyai tujuan hidup (*way of life*), sehingga setiap orang mengetahui apa yang harus dilakukan. Menurut al-Farabi, inilah pentingnya “ideologi” suatu negara untuk menentukan arah pergerakan negara menuju kebahagiaan sejati. Dengan demikian, keutamaan konsepsi al-Farabi yang diperoleh dari ajaran islam.⁵⁶

2. Konsep Negara Ideal

Al-Farabi memulai pembahasan negara utama dengan asal usul negara. Menurutnya, karena ada kepentingan yang sama pada diri individu, maka akan mudah untuk mengarahkan pikiran untuk menuju pada

⁵⁶Syabirin Harahap, *Pokok-Pokok Pikiran Filsuf-Filsuf Islam dan Barat*, (Semarang: Nazamiyah, 2004), h. 161-162.

satu ideologi di dalam negara utama. Sebab, untuk menciptakan negara utama, setiap orang harus bisa bekerjasama secara kolektif.

Al-Farabi tidak bermaksud menghapuskan hak-hak pribadi, akan tetapi dia menekankan agar setiap orang bisa bekerjasama di segala bidang kehidupan. Dengan adanya kerjasama, setiap warga bisa menyalurkan ide (*Ârâ*) atas permasalahan yang dibahas, sehingga warga bisa menemukan solusi dari permasalahan dengan mudah dan cepat. Dengan demikian, tujuan Negara Utama (*al-Madînah al-Fâdlilah*) yang sebenarnya dapat terwujud dengan baik, yaitu kebahagiaan atau "*Sa'âdah Mâdiyyah wa Ma'nawiyyah*". Kebahagiaan jasmani dan rohani, material dan spiritual, dan dunia dan akhirat.⁵⁷

Untuk mencapai kebahagiaan jasmani dan rohani di Negara Utama, maka setiap warga harus melakukan keutamaan-keutamaan yang dapat mengantarkan kepada kebahagiaan sejati. Menurut al-Farabi, warga negara utama harus mempunyai akhlak utama yang sesuai dengan

⁵⁷Abu Nashr al-Farabi, *op. Cit.*, h.121-122.

ajaran Islam, sehingga warga bisa mencapai *Insân Kâmil*.⁵⁸

Dengan unsur-unsur keutamaan itu, manusia dapat mencapai kebahagiaan material dan spiritual. Setiap orang bekerja dengan kemampuan dan bakat masing-masing di bawah komanda kepala negara yang memiliki banyak *skill*. Kepala Negara adalah seorang Guru (*Mu'allim*), sebab dia yang akan mengajar rakyat-rakyatnya. Kepala Negara seorang Pendidik (*Muaddib*), karena dia yang akan menjadi pancaran dari sifat "*nubuwwah*" mendidik rakyat menjadi manusia utama.⁵⁹

Al-Farabi mengklasifikasikan negara berdasarkan ideologi, bukan berdasarkan sistem pemerintahan, seperti monarki, absolut, dan demokrasi. Al-Farabi tidak sependapat dengan pembagian negara secara modern yang berdasarkan kedaulatan rakyat, kekuasaan, dan hukum. Al-Farabi memiliki gagasan sendiri dalam hal ini. Dengan

⁵⁸*Ibid.*, Abu Nashr al-Farabi, h. 101.

⁵⁹Zainal Abidin Ahmad, *op. Cit.*, h. 113.

demikian, al-Farabi mengkonsepsikan Negara Utama sekaligus lawan dari Negara Utama.⁶⁰

a. *Al-Madînah al-Fâdlilah* (Negara Ideal/Utama)

Negara Utama menurut al-Farabi adalah negara yang didirikan oleh warga negara dengan tujuan jelas, yaitu kebahagiaan. Dalam kitab *Ârâ Ahl Madînah al-Fâdlilah* terwujudnya kota utama di dalam negara utama apabila penduduknya memiliki pengertian-pengertian sebagai berikut: Warga memiliki kecerdasan spiritual dan material untuk sampai pada akal aktif. Warga mengetahui sebab-sebab pertama dan tujuan keberadaan manusia. Kemudian munculnya kota utama yaitu suatu kota yang warganya memperoleh kebahagiaan yang diidam-idamkan.⁶¹

Hal ini juga ditegaskan dalam Negara Utama (*Madînah al-Fâdlilah*) karangan M. Zainal Abidin berdasarkan buku *As-Siyâsah al-Madaniyyah* karya al-Farabi bahwa kebahagiaan adalah kebaikan yang tertinggi dan yang diidam-idamkan. Tidak satu pun

⁶⁰*Ibid.*, Zainal Abidin Ahmad, h. 102.

⁶¹Abu Nashr Al-Farabi, *op. Cit.*, h. 146.

yang lebih tinggi dari padanya, yang mungkin dicapai oleh manusia. Ia tidak dapat diwujudkan kecuali dengan ilmu pengetahuan dan dengan usaha. Dan manusia tidak bisa memahami kebahagiaan secara baik, kecuali sesudah mengenal arti keutamaan.⁶²

Dalam buku *Tahsîl as-Sa'âdah*, al-Farabi menegaskan keutamaan-keutamaan yang dapat menjamin akan kebahagiaan sejati. Unsur-unsur keutamaan itu adalah: ilmu pengetahuan, kebijakan, moral dalam berbuat dan berpikir.⁶³

Untuk merealisasikan keutamaan-keutamaan tu, maka warga negara utama memiliki kualifikasi-kualifikasi sebagai warga negara utama, sehingga warga bekerja sesuai dengan kompetensi masing-masing. Selain itu, faktor pemimpin yang akan menentukan keberhasilan mewujudkan negara utama. Maka dari itu, yang menjadi adalah orang yang memiliki kompetensi melebihi semua warga.⁶⁴

⁶²Ahmad Zainal Abidin, *op. Cit.*, h. 72.

⁶³*Ibid.*, Ahmad Zainal Abidin h. 112.

⁶⁴*Ibid.*, Ahmad Zainal Abidin, h. 113.

Kebahagiaan hanya bisa dicapai dengan ilmu pengetahuan dan usaha yang mati-matian, yaitu kebahagiaan yang dikatakan al-Farabi sebagai “*sa’adah madiyah wa ma’nawiyah*”. Kebahagiaan jasmani dan rohani, material dan spiritual untuk hidup dunia dan akhirat.⁶⁵

Untuk mencapai kebahagiaan yang sempurna, tidaklah dapat dilakukan dengan berpikir dan bertindak sendiri-sendiri. Negara harus berhimpun segenap tenaga yang ada, dengan membuat rencana yang lengkap untuk melakukan pembangunan. Al-Farabi mengemukakan tiang-tiang utama bagi pembangunan:

- a. Bersinergi dengan baik
- b. Suci dalam pikiran dan perbuatan
- c. Memiliki semangat kerjasama, keselarasan, dan kasih sayang.⁶⁶

Apabila tiga prinsip itu dilaksanakan dengan baik, maka sistem pembangunan tidak bersifat

⁶⁵Abu Nashr Al-Farabi, *op. Cit.*, h. 105-106.

⁶⁶Abu Nashr Al-Farabi, *op. Cit.*, 113.

individualis. Akan tetapi, al-Farabi juga tidak mengingkari hak perorangan, bahkan ia menganjurkan agar setiap orang bekerja sama, gotong royong, dan saling simpati antara satu sama lain.⁶⁷

Al-Farabi mengatakan bahwa disamping hak milik bersama dimana masing-masing orang dan tiap-tiap kelas mempunyai hak yang sama,⁶⁸ diizinkan pula mempunyai hak pribadi sebagai hasil dari kepandaian dan kerja keras.

b. *Al-Madīnah al-Jāhiliyah* (Negara Jahiliyah)

Negara jahiliyah menurut al-Farabi adalah negara yang tidak mempunyai ideologi yang tinggi, artinya tidak mempunyai tujuan yang ideal sama sekali atau menganut ideologi yang salah, yang berentangan dengan kebahagiaan. Kota ini dihuni oleh warga yang tidak mengetahui tentang arti kebahagiaan (yang seharusnya menjadi tujuan utama manusia) dan hal ini memang tidak terlintas di dalam benak mereka. Jika

⁶⁷ Abu Nashr Al-Farabi, *loc. Cit.*

⁶⁸ *Ibid.*, h. 88.

diarahkan secara benar untuk sampai kepada hal tersebut (kebahagiaan), mereka tetap tidak dapat memahaminya, bahkan tidak mempercayainya.⁶⁹

Kebahagiaan terbesar yang paling sempurna bagi mereka adalah apabila orang dapat memperoleh secara total segala hal seperti kesehatan badan, kemakmuran, kenikmatan, kesenangan jasmani, kebebasan melampiaskan hawa nafsu, dan merasa dihormati. Adapun keadaan-keadaan seperti badan yang tidak sehat, tidak adanya hiburan, ketiadaan kebebasan melampiaskan hawa nafus, dan tidak memperoleh penghormatan merupakan sebuah penderitaan.⁷⁰

Al-Farabi membagi negara Jahiliyah menjadi enam macam, yaitu sebagai berikut;

1. *Al-Madînah al-Dharûriyyah* (Negara Kebutuhan Dasar)⁷¹

⁶⁹Ibid., h.151.

⁷⁰Ibid., h. 153-155.

⁷¹Warga yang mengutamakan kebutuhan jasmani, seperti; makan, minum, berpakaian, bertempat tinggal, dan menikah. Lihat Abu Nashr al-Farabi, *Ara' Ahl al-Madînah al-Fâdlilah*, h. 132.

2. *Al-Madînah al-Baddalah* (Negara Jahat)⁷²
3. *Al-Madînah al-Khissah wal al-Siquut* (Negara Rendah dan Hina)⁷³
4. *Al-Madînah al-Karîmah* (Negara Kehormatan, Aristokratik)⁷⁴
5. *Al-Madînah al-Taghallub* (Negara Imperalis)⁷⁵
6. *Al-Madînah al-Jamâiyyah* (Negara Komunis)⁷⁶

c. *Al-Madînah al-Fâsiqah* (Negara Fasiq)

⁷²Warga dengan tujuan hidup utama yaitu, untuk menimbun kekayaan dan kemakmuran. Cara memperoleh kekayaan dari berbagai jenis profesi maupun sumber daya alam yang ada di negeri itu. Yang menjadi pemimpin negara ini adalah orang yang terkaya diantara mereka.

⁷³Warga yang memiliki tujuan hidup untuk bersenang-senang belaka. Seperti; makanan, minuman, dan menikah (hubungan seks). Kesenangan itu hanyalah untuk bersenda gurau dan main-main belaka. Lihat Abu Nashr al-Farabi, *Ara' Ahl al-Madînah al-Fadlilah*, h. 132.

⁷⁴Warga yang melakukan segala sesuatu hanya untuk memperoleh prestise(kehormatan atau pujian) dari bangsa-bangsa lain. Lihat Abu Nashr al-Farabi, *Ara' Ahl al-Madînah al-Fadlilah*, h. 132.

⁷⁵Warga yang memiliki tujuan hidup untuk memerangi dan mengalahkan kelompok lain. Dan mencegah kelompok (orang) lain menundukkan mereka. Atau dengan kata lain, tidak boleh ada yang menandingi negara ini. Lihat Abu Nashr al-Farabi, *Ara' Ahl al-Madînah al-Fadlilah*, h. 132.

⁷⁶Warga dengan tujuan hidup hanya untuk memperoleh kebebasan dengan cara melampiasakan hawa nafsu. Lihat Abu Nashr al-Farabi, *Ara' Ahl al-Madînah al-Fâdlilah*, h. 133.

Negara Fasik yaitu sebuah negara dengan penduduk yang mengenal kebahagiaan, Tuhan, dan Akal Fa'al, seperti penduduk negara utama. Akan tetapi, tingkah laku penduduk negara fasik sama dengan negara bodoh. Apa yang mereka lakukan berbeda dengan apa yang mereka ucapkan..⁷⁷

Orientasi warga negara fasik melakukan itu semua dengan alasan yang bermacam-macam antara lain ialah; mempertahankan prestise, kemenangan, dan lain-lain sehingga mereka melakukan hal-hal demikian di luar dari apa yang mereka yakini kebenarannya.

Jadi, persamaan antara warga dari negara fasik dan warga negara Ideal/Utama adalah dari segi pendapat yang mereka yakini saja, tidak pada praktiknya.

d. *Al-Madīnah al-Mubaddilah* (Negara yang Bertukar Kebutuhan)

Negara yang Bertukar Kebutuhan adalah negara yang pandangan-pandangan dan perbuatan-perbuatan

⁷⁷*Ibid.* Abu Nashr al-Farabi, *Ārâ' Ahl al-Madīnah al-Fâdlilah*, h. 133.

penduduknya pada mulanya sama dengan pandangan dan perbuatan masyarakat negara utama, kemudian beralih dari pandangan itu karena kemasukan pandangan lain sehingga menyeleweng dari pandangan semula.⁷⁸

Penyelewengan-penmyelewengan itu menyebabkan negara menyimpang jauh dari garis-garis yang ada dalam negara utama sehingga apa yang mereka lakukan semakin menjauh dari tercapainya kebahagiaan.⁷⁹

e. *Al-Madînah al-Dhallah* (Negara Sesat)

Negara Sesat yaitu negara yang penduduknya memiliki pemikiran yang salah tentang Tuhan dan akal Fa'al. Meskipun demikian, kepala negara ini tetap menganggap bahwa dirinya mendapat wahyu, kemudian ia menipu orang lain dengan ucapan dan tingkah lakunya..⁸⁰

⁷⁸*Ibid.*, h. 133.

⁷⁹Ahmad Zainal Abidin, *op. Cit.*, h. 104.

⁸⁰Abu Nashr al-Farabi, *op. Cit.*, h. 133.

Dari uraian di atas mengenai konsep Negara Ideal/Utama beserta negara yang berlawanan dengan Negara Ideal/utama, kita mulai mendapat pemahaman tentang pembagian-pembagian negara. Pembagian negara itu berdasarkan ideologi warga dan pemimpinnya, karena memang unsur utama dalam negara adalah warga dan pemimpinnya.

3. Kepala Negara Ideal

Menurut al-Farabi, pemimpin negara utama adalah orang yang paling kuat akalunya. Sebab, ia akan membawa warga untuk sampai pada akal fa'al. Seorang pemimpin harus dapat membuktikan bahwa dirinya adalah orang yang sejahtera, sehingga warga dapat percaya bahwa pemimpin dapat membawa warga untuk menuju kepada kehidupan yang sejahtera.⁸¹

Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mau mengikutinya.

⁸¹*Ibid.*, Abu Nashr al-Farabi, h. 127.

Kemampuan untuk mempengaruhi tidak dimiliki oleh setiap orang, maka setiap orang harus berlomba untuk menjadi yang terbaik. Dengan demikian, yang dapat menjadi pemimpin negara utama adalah orang yang memiliki ilmu-ilmu teoritis dan keutamaan berpikir sebagaimana yang dimiliki oleh seorang filosof.⁸²

Pemimpin di negara utama harus memiliki keilmuan yang tinggi, sebab ia akan menjadi tauladan secara pemikiran maupun perbuatan untuk warga. Seorang pemimpin harus mampu memposisikan dirinya. Ia mampu berada di depan sebagai kepala negara, berada di belakang sebagai pelindung, di tengah sebagai sahabat bagi warga. Dengan demikian, pemimpin dalam negara utama mampu mengarahkan tindakan-tindakan ke arah kebahagiaan.⁸³

Pokok penting dari pembahasan mengenai kepemimpinan adalah bagaimana dan apa saja kriteria dari seorang pemimpin. Dalam hal ini al-Farabi ingin

⁸²Abu Nashr al-Farabi, *Tahsil al-Sa'âdah*, (Hyderabad: Majlis Daa'irah al-Ma'arif al-Utsmaniyyah, 1349 H.), h. 43.

⁸³Abu Nashr al-Farabi, *Ârâ' ahl al-Madînah al-Fâdlilah*, *op. Cit.*, h. 127-129.

mengungkapkan kriteria ideal bagi seseorang yang akan menjadi pemimpin.

Pembahasan tentang kriteria pemimpin sangat jelas dalam kitab *Ârâ' Ahl al-Madînah al-Fâdlilah*, karena al-Farabi menuliskannya dalam bab khusus mengenai kriteria pemimpin, sehingga kita dapat memahaminya dengan baik tanpa interpretasi yang cukup rumit.

Sebelum membahas tentang kriteria pemimpin menurut al-Farabi, ada tiga golongan manusia, dari segi kapasitasnya untuk memimpin, yaitu;

- a. Manusia yang memiliki bakat untuk memimpin. Manusia ini wajib menduduki (jabatan) sebagai pemimpin utama. Sebab, secara natural ia dapat mempengaruhi warga untuk mengikutinya.
- b. Manusia yang bisa dipimpin dan memimpin. Manusia dalam kategori ini memiliki ilmu-ilmu teoritis yang spesifik dan memiliki keyakinan terhadap kebenaran yang diajarkan oleh pendahulunya. Manusia ini memiliki kemampuan memimpin diatas rata-rata masyarakat tetapi hanya mampu memimpin suatu kota saja.

- c. Manusia yang hanya bisa dipimpin. Manusia jenis ini memiliki kemampuan teoritis dan kekuatan yang terbatas.⁸⁴

Maksud dari al-Farabi menentukan kapasitas pemimpin adalah untuk memberi gambaran umum kriteria manusia agar kita dapat menentukan pemimpin berdasarkan potensi-potensinya dalam memimpin.

Menurut al-Farabi, pemimpin pada peringkat pertama adalah pemimpin yang secara natural memiliki 12 persyaratan dasar, yaitu;

- a. Memiliki anggota badan yang sempurna.
- b. Memiliki logika yang bagus dan mampu memecahkan persoalan
- c. Memiliki ingatan dan hafalan yang kuat
- d. Memiliki kepandaian dan kecerdasan yang baik. Apabila dia melihat sesuatu dengan sedikit bukti (dalil), ia cepat tanggap ke arah mana dalil (bukti) itu akan menuju.

⁸⁴Abu Nashr al-Farabi, *Tahsîl al-Sa'âdah*, op. Cit, h. 36-38.

- e. Memiliki retorika yang bagus, dapat menerangkan dengan baik dan sempurna apa (keterangan) yang tersembunyi.
- f. Cinta kepada ilmu pengetahuan,
- g. Menjauhkan diri dari hal-hal yang syubhat
- h. Mencintai kebajikan dan membenci kemungkarannya
- i. Memiliki jiwa yang besar, terhadap permasalahan (kesulitan) yang menimpa dirinya.
- j. Mengutamakan urusan akhirat dari pada dunia
- k. Sanggup menegakkan keadilan
- l. Memiliki keberanian untuk menegakkan kebajikan dan berani menanggung segala resiko.⁸⁵

Syarat-syarat tersebut oleh al-Farabi di atas, diakui sangat sulit terwujud secara bersama-sama pada diri seseorang. Oleh karena itu, al-Farabi memberikan

⁸⁵Abu Nashr al-Farabi, *Ârâ' ahl al-Madînah al-Fâdlilah*, op. Cit., h. 127-129.

alternatif persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemimpin negara utama. Yaitu sebagai berikut;

- a. Bijaksana (Hikmah)⁸⁶
- b. Mengerti dan mampu melaksanakan undang-undang⁸⁷.
- c. Memiliki kecerdasan dalam mengambil keputusan⁸⁸.
- d. Berpandangan futuristik⁸⁹.
- e. Mampu menasehati orang⁹⁰.

⁸⁶Kebijaksanaan (dalam bahasa arab: *hikmah*) digunakan untuk menyempurnakan tujuan ilmu, yaitu kebahagiaan tertinggi yang dapat diraih oleh manusia. Dengan demikian, yang dimaksud hikmah adalah bagaimana ilmu dapat sampai pada tujuan utamanya yaitu kebahagiaan.

⁸⁷Dia mengerti dan mampu menjalankan syari'at, undang-undang, serta melaksanakan apa yang telah dilakukan oleh para pendahulunya. Sehingga apa yang dipraktekkan adalah sebagai penyempurna dari apa yang pernah dilakukan oleh para pendahulunya. Lihat, Abu Nashr al-Farabi, *Ara' Ahl al-Madinah al-Fadlilah*, h. 129.

⁸⁸Memiliki kemampuan yang baik dalam mengambil kesimpulan terhadap syari'at dalam memecahkan permasalahan-permasalahan kontemporer (yang belum muncul di masa lalu). Lihat, Abu Nashr al-Farabi, *Ârâ' Ahl al-Madînah al-Fâdlilah*, h. 129.

⁸⁹Memiliki kemampuan yang baik dalam mengambil kesimpulan terhadap fenomena yang terjadi sekarang, kemudia dapat memprediksi persoalan-persoalan yang akan dihadapi nanti. Lihat, Abu Nashr al-Farabi, *Ârâ' Ahl al-Madînah al-Fâdlilah*, h. 129.

⁹⁰Mampu memberi nasehat dengan kata-kata yang baik tentang pelaksanaan syari'at, sebagaimana yang dijalankan oleh para terdahulunya dan memiliki kemampuan untuk menerangkan kesimpulan-kesimpulan pelaksana syari'at yang

f. Berbadan sehat^{91, 92}.

Apabila persyaratan tersebut tidak ditemukan pada satu orang, tetapi ada pada dua orang yang satu adalah orang yang penuh kebijaksanaan sedangkan persyaratan selebihnya dimiliki oleh orang lain, maka keduanya dapat bersama-sama menjadi pemimpin negara yang bekerja sama satu sama lain. Jika syarat itu terdapat pada banyak orang, maka secara otomatis pemimpin utama negara utama akan dipegang secara kolektif adalah.⁹³

Akan tetapi, jika ada yang memiliki persyaratan dari nomor dua sampai enam, sedangkan syarat pertama kebijaksanaan tidak ada, maka negara itu sama sekali tidak mempunyai pemimpin, karena didalamnya tidak ada orang bijaksana yang dapat mengatur negara itu dengan baik.

akan diambil oleh orang-orang sesudahnya. Lihat, Abu Nashr al-Farabi, *Ârâ' Ahl al-Madînah al-Fâdlilah*, h. 130.

⁹¹Secara fisik ia sehat, bahkan memiliki kemampuan untuk berperang apabila diperlukan sewaktu-waktu dan dalam peperangan dia mampu menjadi panglima. Lihat, Abu Nashr al-Farabi, *Ârâ' Ahl al-Madînah al-Fâdlilah*, h. 130.

⁹²Abu Nashr al-Farabi, *Ârâ' Ahl al-Madînah al-Fâdlilah*, *op. Cit.*, h. 129-130.

⁹³Abu Nashr al-Farabi, *Ârâ' Ahl al-Madînah al-Fâdlilah*, *op. Cit.*, h. 130.

Akibatnya negara itu akan mengalami kehancuran dalam waktu yang tidak lama lagi.⁹⁴

⁹⁴Abu Nashr al-Farabi, *Ârâ' Ahl al-Madînah al-Fâdlilah*, *loc. Cit.*, h. 130.

BAB III

PEMIKIRAN IBNU SINA TENTANG KONSEP NEGARA IDEAL

A. Biografi Ibnu Sina

1. Pendidikan dan karir Ibnu Sina

Dalam sejarah pemikiran filsafat abad pertengahan, sosok Ibnu Sina(w. 428 H/1037 M) dalam banyak hal unik, sedang diantara para filosof muslim ia tidak hanya unik, tapi juga memperoleh penghargaan yang semakin tinggi hingga masa modern. Ia adalah satu-satunya filosof besar Islam yang telah berhasil membangun sistem filsafat yang lengkap dan terperinci, suatu sistem yang telah mendominasi tradisi filsafat muslim beberapa abad.⁹⁵

Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Husain Ibn Abdillah Ibn Sina. Ia dilahirkan pada bulan Safar tahun 370 H/Agustus tahun 989 M. di Afshanah, dekat kota

⁹⁵Imam Munawir, *Mengenal Pribadi 30 Pendekar dan Pemikir Islam dari masa ke masa*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu), 1985, h. 332 – 333.

Kharmaitan, Kabupaten Balkh, wilayah Afganistan, Propinsi Bukhara (sekarang masuk daerah Rusia)⁹⁶.

Ayahnya bernama ‘Abdullah, seorang sarjana terhormat penganut Syi’ah Isma’iliyyah,⁹⁷ Walaupun diri Ibn Sina menolak identitas itu. Ayahnya berasal dari Balkh Khurasan, suatu kota yang termasyhur di kalangan orang-orang Yunani dengan nama Bakhtra. Ayahnya tinggal di kota Balkh, tetapi beberapa tahun setelah lahirnya Ibn Sina, keluarganya pindah ke Bukhara karena ayahnya menjadi gubernur di suatu daerah di salah satu pemukiman Daulat Samaniyah pada masa pemerintahan Amir Nuh ibn Manshur,⁹⁸ sekarang wilayah Afghanistan (dan juga Persia). Sedangkan ibunya bernama Astarah, berasal dari Afshana yang termasuk wilayah Afghanistan. Ada yang menyebutkan ibunya sebagai orang yang berkebangsaan

⁹⁶ Arthur Thomas Arberry & Sir Thomas Adam`s, *Avecenna on Theology*, (London: John Murray, t.th), h. 2. Lihat juga Ahmad Daudy, *Kuliah Filsafat Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 66-68.

⁹⁷ Imam Tholkhah dan Ahmad Barizi, *Membuka Jendela Pendidikan; Mengurai Akar Tradisi dan Integrasi Keilmuwan Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 248.

⁹⁸ Muhammad Tolhah Hasan, *Dinamika Pemikiran Tentang Pendidikan Islam* (Jakarta: Lantabora Press, 2006), h. 116.

Persia, karena pada abad ke-10 M, wilayah Afghanistan ini termasuk daerah Persia.⁹⁹

Ibnu Sina(w. 428 H/1037 M) adalah potret seorang yang selalu haus pada ilmu pengetahuan. Sejak kecilnya, orang bijak ini menampakkan bakatnya yang luar biasa dan hebat dalam memperoleh ilmu dan keahlian. Ia pun memperoleh kedudukan terhormat dikalangan teman-temannya, karena keunggulannya dalam ilmu-ilmu dan kejuruan Islam, sehingga dijuluki dengan gelar-gelar besar seperti, *Syaikh Ra'is* dan *Hujjat al-Haq*, yang masih dikenal di Timur hingga kini.¹⁰⁰

Ia bernasib baik, karena orang tuanya yang bermadzhab Ismaili memperhatikannya secara seksama dan mengajarnya. Sebagaimana kedudukann orang tuanya adalah sebagai tempat bertemunya para ulama dari segala penjuru. Ibn Sina hafal al-Qur'an dan menguasai nahwu, pada 10 tahun. Ia kemudian sengaja mempelajari ilmu logika dan ilmu pasti yang diambilnya dari Abdillah Hatali.

⁹⁹Abuddin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam, Suatu Kajian Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 61.

¹⁰⁰Sayyed Husain Nasr, *History of Islamic Philosophy*, (New York: Routledge, 1996), h. 231.

Setelah ia berhasil dalam pelajaran-pelajarannya secara baik, ia sengaja mempelajari ilmu-ilmu alam, metafisika, yang didalamnya terdapat metafisikanya “Aristoteles“, yang perlu dibacanya berulang kali dan dicatatnya, dari awal hingga akhir, sampai hafal tanpa memahami isinya.¹⁰¹ Akibatnya, setelah menemukan keterangan Al-Farabi mengenai buku Aristoteles itu secara kebetulan, yang berjudul *On The Intentions of The Metaphysics*.¹⁰² Dari buku al-Farabi itu, ia dapat mengatasi apa yang pada mulanya tertutup baginya, yaitu yang berkaitan dengan buku Aristoteles tersebut.

Pendidikan Ibnu Sina(w. 428 H/1037 M) bersifat ensiklopedik mulai dari tata bahasa, geometri, fisika, kedokteran, hukum, dan teologi.¹⁰³ Selain itu, ia juga belajar ilmu kedokteran dari seorang Masehi yang bernama Isa bin Yahya. Dan pada umur 16 tahun, ia telah menjadi seorang dokter dan mampu memecahkan masalah pengobatan dengan melalui metode eksperimen yang dilakukannya,

¹⁰¹*Ibid*, h. 232.

¹⁰²Majid Fakhry, *Sejarah Filsafat Islam; Sebuah Peta Kronologis*, (Bandung: Mizan, 2001), h. 55.

¹⁰³Aan Rukmana, *Ibn Sina Sang Ensiklopedik, Pemantik Pijar Peradaban Islam* (Jakarta: Dian Rakyat, 2013), h.22.

termasuk mengobati Sultan Bukhara, Nuh bin Manshur dan berhasil sembuh, sehingga ia diberi kesempatan untuk membaca segala buku-buku yang ribuan banyaknya di dalam perpustakaan sultan. Dengan daya ingat yang dimilikinya ia dapat menguasai sebagian besar isi buku-buku tersebut, walaupun usinya ketika itu baru 18 tahun.¹⁰⁴ Hal ini juga menjadi bukti bahwa kehadirannya menambah satu dokter tingkat universitas.¹⁰⁵

Ketika berusia delapan belas tahun itu, ia memulai karirnya dengan mengikuti kiprah orang tuanya, yaitu membantu tugas-tugas amir Nuh ibn Manshur. Ia diminta menyusun kumpulan pemikiran filsafat oleh Abu al-Husain al-‘Arudi, yaitu menyusun buku *al-Majmu’*. Setelah itu ia menulis buku *al-Hasil wa al-Mahsul* dan *al-Birr wa al-Ism* atas permintaan Abu Bakar al-Barqi al-Khawarizmi.¹⁰⁶

Pada usianya yang 22 tahun, ayahnya wafat, dan kemudian terjadi kemelut politik di tubuh pemerintahan

¹⁰⁴Yunasril Ali, *Perkembangan Pemikiran Falsafah dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), Cet. 1, h. 58.

¹⁰⁵Thawil Akhyar Dasoeki, *Sebuah Kompilasi Filsafat Islam*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), Cet.I, h. 34.

¹⁰⁶Aan Rukmana, *Op. Cit.*, h. 24.

Nuh bin Manshur. Kedua orang putera kerajaan, yaitu Manshur dan Abdul Malik saling berebut kekuasaan, yang dimenangkan oleh Abdul Malik. Selanjutnya dalam pemerintahan yang belum stabil itu terjadi serbuan yang dilakukan oleh kesultanan Mahmud al-Ghaznawi, sehingga seluruh wilayah kerajaan Samani yang berpusat di Bukhara jatuh ke tangan Mahmud al-Ghaznawi tersebut.

Dalam kondisi situasi politik yang begitu ricuh, Ibnu Sina(w. 428 H/1037 M) memutuskan untuk meninggalkan daerah asalnya. Dia pergi ke Karkan yang termasuk ibu kota al-Khawarizm, dan di daerah tersebut Ibn Sina mendapat penghormatan dan perlakuan yang baik. Di kota ini pula Ibn Sina banyak berkenalan dengan sejumlah pakar para ilmuwan seperti, Abu al-Khir al-Khamar, Abu Sahl 'Isa bin Yahya al-Masiti al-Jurjani, Abu Rayhan al-Biruni dan Abu Nash al-Iraqi. Setelah itu Ibnu Sina(w. 428 H/1037 M) melanjutkan perjalanan ke Nasa, Abiwarud, Syaqaq, Jajarin dan terus ke Jurjan. Setelah kota yang ia singgahi terakhir ini juga kurang aman, Ibn Sina memutuskan pindah ke Rayi dan bekerja pada As-Sayyidah dan puteranya Madjid al-

Daulah yang pada waktu itu terserang penyakit, dan membantu menyembuhkannya.

Selain kepandaiannya sebagai filsuf dan dokter, ia pun penyair. Ilmu-ilmu pengetahuan seperti ilmu jiwa, kedokteran dan kimia, ditulisnya dalam bentuk syair. Terdapat pula buku-buku yang dikarangnya untuk ilmu logika, juga dalam bentuk syair. Kebanyakan buku-bukunya telah disalin kedalam bahasa Latin, ketika orang-orang Eropa diabad tengah mulai mempergunakan buku-buku itu sebagai *textbook* berbagai universitas. Oleh karena itu nama Ibnu Sina(w. 428 H/1037 M) pada abad pertengahan di Eropa sangat berpengaruh.¹⁰⁷

Di bidang filsafat, Ibnu Sina(w. 428 H/1037 M) dianggap sebagai imam para filosof di masanya, bahkan sebelum dan sesudahnya. Ibnu Sina(w. 428 H/1037 M) otodidak dan genius orisinil yang bukan hanya dunia Islam menyanjungnya. Roger Bacon, filosof kenamaan dari Eropa Barat pada Abad Pertengahan menyatakan dalam *Legacy of Islam*-nya Alfred Gullaume; “Sebagian besar filsafat

¹⁰⁷Busyairi Madjidi, *Konsep Pendidikan Para Filosof Muslim*, (Yogyakarta : Al-Amin Press. 1997), h. 47 – 51.

Aristoteles sedikitpun tak dapat memberi pengaruh di Barat, karena kitabnya tersembunyi entah dimana, dan sekiranya ada, tentu sangat sukar didapatkan dan sangat susah dipahami orang karena peperangan-peperangan yang merajarela di sebelah Timur, sampai saatnya Ibnu Sina(w. 428 H/1037 M) dan Ibnu Rusyd dan juga pujangga Timur lain membuktikan kembali falsafah Aristoteles disertai dengan penerangan dan keterangan yang luas.”¹⁰⁸

Kemampuan Ibnu Sina(w. 428 H/1037 M) dalam bidang filsafat dan kedokteran sama beratnya. Dalam bidang kedokteran dia mempersembahkan *Al-Qânûn fit-Thibb*-nya, yang ia susun secara sistematis. Dalam bidang materia medica, Ibnu Sina(w. 428 H/1037 M) telah banyak menemukan bahan nabati baru *Zanthoxyllum budrunga* dimana tumbuh-tumbuhan banyak membantu terhadap beberapa penyakit tertentu, seperti radang selaput otak (*miningitis*). Ibnu Sina(w. 428 H/1037 M) juga menjadi orang pertama yang menemukan peredaran darah manusia, dimana enam ratus tahun kemudian disempurnakan oleh William Harvey. Dia adalah orang yang pertama kali

¹⁰⁸Thawil Akhyar Dasoeki, *op. Cit.*, h. 38 – 39.

mengatakan bahwa bayi selama masih di dalam kandungan mengambil makanannya lewat tali pusarnya. Dia juga merupakan yang pertama kali mempraktekkan pembedahan penyakit-penyakit bengkok yang ganas dan menjahitnya. Dan dia juga terkenal sebagai dokter ahli jiwa dengan cara-cara modern yang kini disebut *psikoterapi*.¹⁰⁹

Hidup Ibnu Sina(w. 428 H/1037 M) penuh dengan kesibukan bekerja dan mengarang, penuh pula dengan kesenangan dan kepahitan, dan mungkin saja keadaan inilah yang mempengaruhi kesehatannya sehingga ia terserang maag kronis (*colic*) yang tidak bisa disembuhkan lagi. Beliau akhirnya wafat pada bulan Ramadhan 428 H/Julai tahun 1037 M. dalam usia 58 tahun dan dimakamkan di Hamazan.

2. Karya-karya

Meskipun Ibnu Sina(w. 428 H/1037 M) disibukkan dengan aktivitas politik, akan tetapi ia tidak pernah meninggalkan kebiasaannya sejak muda, yaitu menulis. Begitu banyak buah karya Ibnu Sina(w. 428 H/1037 M)

¹⁰⁹*Ibid.*, h. 37 – 38.

yang menjadi investasi berupa khazanah intelektual generasi yang akan datang. Berbagai bidang ilmu yang sudah ia tulis seperti filsafat, etika, politik, ilmu jiwa, dan sebagainya.

Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh Father dari Domician di Kairo terhadap karya-karya Ibnu Sina(w. 428 H/1037 M), ia mencatat sebanyak 276 (dua ratus tujuh puluh enam) buah. Sedangkan menurut Phillip K. Hitti dengan menggunakan daftar yang dibuat al-Qifti mengatakan bahwa karya-karya tulis Ibn Sina sekitar 99 (sembilan puluh sembilan) buah.¹¹⁰ Karya-karyanya ini sebagian besar dalam berbahasa Arab, tetapi ada sebagian kecil diantaranya berbahasa Persia.¹¹¹

Dan diantara karya-karyanya yang paling terkenal adalah sebagai berikut; ¹¹² *As-Syifa'*. Buku filsafat yang terpenting dan terbesar dari Ibnu Sina(w. 428 H/1037 M). Terdiri dari 4 bagian, yaitu; logika, fisika, matematika, dan

¹¹⁰Abuddin Nata, *op. Cit.*, h. 65

¹¹¹Diantara karyanya yang berbahasa Persia, seperti *Danishnamah 'Ala'i* (buku ilmu pengetahuan yang dipersembahkan kepada 'Ala al-Daulah). Buku ini merupakan karya filsafat pertama di Persia Modern. Lihat, Fathor Rachman Ustman, "Pemikiran Pendidikan Ibnu Sina" *Jurnal Tadris*, Volume 5, Nomor 1 (April, 2010), h. 41.

¹¹²Lihat Thawil Akhyar Dasoeki, *op.Cit.*, h. 38-39. Ahmad Daudy, *op.Cit.*, h. 69.

metafisika. *Al-Qanun fi al-Tibb*. Buku ini pernah menjadi buku standar untuk universitas di Eropa sampai akhir abad XVII M.¹¹³ *Risâlah as-Siyâsah* adalah buku yang berisikan tentang politik. Ibnu Sina(w. 428 H/1037 M) menulis buku ini pada 20 tahun sebelum kematiannya. Dipublikasikan pertama oleh Majalah al-Masyriq yang dipimpin oleh Abu Luis Makluf dari Yesuit pada tahun 1906. Dalam buku *as-Siyâsah* sebagaimana yang dikutip oleh Dr. Muhammad Yusuf Musa, bahwa kitab ini menguraikan tentang keluarga, susunan rumah tangga, dan pendidikan. Ibnu Sina(w. 428 H/1037 M) menghimpun ketiga unsur menjadi bagian integral negara yang tidak bisa dipisahkan. *An-Najâh* merupakan kitab ringkasan as-Syifâ' dan pernah diterbitkan bersama-sama dengan kitab al-Qanûn dalam ilmu kedokteran pada tahun 1593 M. Kitab ini ditulis pada saat melakukan perjalanan menuju Sabur Khawast dan ia sedang mengabdikan kepada Ala' ad-Daulah. *Al-Isyârat Wat-Tanbîhât* sebuah karya filsafat etika yang kemudian diedit oleh Sulaiman Dunya, pernah terbit pada 1325 H. Al-Jurjani mengomentari bahwa kitab ini merupakan karya monumental

¹¹³Ahmad Hanafi, *Pengantar Filsafat Islam*, (Jakarta: Bulan, Bintang, 1976), Cet. 2, h. 170-171.

terakhir Ibnu Sina(w. 428 H/1037 M). *Al-Qânûn fi al-Thîb*, sebuah karya yang menggabungkan antara teori Epocritus dan kedokteran Galliens, selain menambahkan kedokteran India, Persia, Suryani, dan Arab yang dia ketahui, serta pengalaman dan percobaan yang dilakukannya sendiri. Kitab ini terbit pada di Roma pada tahun 1655 H. Buku ini memiliki kelebihan karena memberikan penjelasan tentang hubungan yang erat antara berbagai kondisi kejiwaan dan penyakit badan. *Fi aqsâm al-'Ulûm al-'Aqliyah* merupakan kitab yang membahas tentang fisika manuskrip, dan buku ini menggunakan bahasa. 1910 M. *Al-Qânûn*, yaitu kitab yang menduduki tempat yang sangat terhormat di antara buku-buku kedokteran yang muncul sebelumnya, dan menjadi buku kedokteran diandalkan di dunia Islam hingga awal abad kedua puluh. Sebagian dia tulis di Jurjan dan di Ar-Rayy, kemudian diselesaikan di Hamadzan. Ibnu Sina(w. 428 H/1037 M) bermaksud memberikan uraian(komentar) dan melakukan eksperimen-ekperimen. Kitab ini pernah diterjemahkan ke dalam bahasa latin dan pernah menjadi buku standar universitas-universitas Eropa

sampai akhir abad 17 M.¹¹⁴ *Hayy ibn Yaqzhdhan* merupakan suatu alegori tentang akal aktif. *Lisân al-‘Arab* yaitu kitab tentang filologi yang dikarang di Isfahan. *Al-Majmu’* (kompilasi) yang dikenal dengan al-Hikmah al-Arudhiyyah. Ibnu Sina menulis kitab ini pada usia dua puluh satu tahun untuk al-Hasan al-Arudhi, tanpa mengikutkan matematika. *Al-Hidâyah* (Petunjuk) berisi filsafat yang ditulis pada waktu Ibnu Sina (w. 428 H/1037 M) ditahan di benteng Fardajan. Kitab ini dipersembahkan untuk saudaranya, yaitu Ali. Buku ini berisi sebuah ringkasan semua cabang-cabang filsafat. *Risâlah ath-Thair* (Burung), sebuah kitab yang berisi allegori. Dia menjelaskan pencapaiannya dalam ilmu al-Haq.

B. Pemikiran Ibnu Sina tentang Negara Ideal

1. Asal Mula Negara

Suatu keniscayaan yang tidak dapat dipungkiri bahwa manusia adalah makhluk ekonomi (*economical animal* atau *homo economicus*),¹¹⁵ yaitu makhluk yang selalu memikirkan masa depan. Kebutuhan masa depan

¹¹⁴Husayn Ahmad Amin., *op. Cit.*, h. 158-159.

¹¹⁵Zainal Abidin Ahmad, *Negara Adil Makmur: Ibnu Sina*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 185.

manusia yang tidak terbatas, mengharuskan manusia untuk berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan kehidupannya. Maka, manusia selalu berlomba-lomba dalam mendapatkan materi sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani.

Menurut Ibnu Sina(w. 428 H/1037 M), manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan pergaulan dan perkumpulan dengan orang lain. Kecenderungan manusia untuk bergaul dan memenuhi kebutuhan hidup menjadi salah satu ciri yang membedakan antara manusia dengan makhluk lain, yaitu hewan. Manusia tidak bisa hidup seorang diri dalam mencapai keperluan-keperluannya. Maka dari itu, sesama manusia harus saling membantu untuk mencapai kepuasan bersama.¹¹⁶

Meskipun, Ibnu Sina(w. 428 H/1037 M) menetapkan teorinya bahwa ekonomi merupakan motif pertama dalam berdirinya negara, akan tetapi dia juga menyetujui pendapat para Filsuf Yunani bahwa manusia adalah makhluk sosial (sosial animal). Karena manusia yang berjiwa ekonomi itu

¹¹⁶*Ibid*, h. 183.

mebutuhkan pergaulan, kemudian pergaulan menimbulkan masyarakat, sehingga muncullah negara.¹¹⁷

Bukti bahwa manusia makhluk ekonomi, Ibnu Sina(w. 428 H/1037 M) mengambil pelajaran dari kisah Nabi Adam yang diturunkan dari syurga ke bumi, karena Nabi Adam telah memakan buah khuldi. Ibnu Sina(w. 428 H/1037 M) berpendapat bahwa sebab Nabi Adam memakan buah khuldi adalah karena naluri manusia yang berekonomi untuk memenuhi kebutuhan pangan.¹¹⁸

Jika Ibnu Sina(w. 428 H/1037 M) telah menetapkan bahwa motif utama terbentuknya negara adalah ekonomi, maka semua pembahasan tentang masyarakat dan negara akan mengarah kepada persoalan ekonomi. Pertama, manusia membutuhkan adanya negara dan perserikatan-perserikatan lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang selalu berkembang dan meningkat. Namun, apabila manusia belum mampu memenuhi syarat untuk mendirikan sebuah negara, maka menurut Ibnu Sina(w. 428 H/1037 M), mereka belum bisa disebut manusia sempurna. Sehingga,

¹¹⁷Ibnu Sina, *As-Syifâ(Maqalah ke sepuluh)*, www. Al-Mostafa.com, h. 182.

¹¹⁸Zainal Abidin Ahmad, *op. Cit.*, h. 184.

mereka harus bekerja lebih keras untuk memenuhi syarat-syarat dalam mendirikan sebuah negara.¹¹⁹

Agar kebutuhan pangan terpenuhi maka diperlukanlah yang namanya komunitas, kelompok, atau negara¹²⁰. Syarat utama bagi negara adalah sebagai berikut;

- a. Negara membutuhkan hukum
- b. Hukum harus adil
- c. Hukum dan keadilan membutuhkan adanya pembuat hukum dan pelaksana keadilan, yaitu pemerintah.
- d. Pembuat hukum dan pelaksana keadilan harus manusia, yang dapat berbicara langsung di depan masyarakat.
- e. Hukum dan keadilan berfungsi mengatur kehidupan manusia.¹²¹

2. Konsep Negara Ideal

Perlu diketahui sebelumnya, bahwa menurut Ibnu Sina(w. 428 H/1037 M), negara berasal dari keluarga

¹¹⁹Ibnu Sina, *op. Cit.*, h. 182-183.

¹²⁰Zainal Abidin Ahmad, *op. Cit.*, h. 211.

¹²¹*Ibid*, h. 215-216.

(rumah tangga). Negara dan rumah tangga (keluarga) adalah merupakan saudara kembar yang sangat berhubungan erat. Yang satu merupakan asal usul (yaitu rumah tangga atau keluarga), sedangkan yang lainnya merupakan puncak kesempurnaannya (yaitu negara).¹²²

Miniatur dari negara adalah rumah tangga. Negara diibaratkan sebagai sebuah keluarga (rumah tangga). Anggota keluarga terdiri atas Ayah, Ibu, dan anak-anak. Setiap keluarga pasti mempunyai visi atau tujuan kedepan yang ingin dicapai dan disepakati bersama. Oleh karena itu, terdapat pembagian tugas dan kewajiban masing-masing sesuai kemampuannya. Kita harus memupuk rasa saling menyayangi, menghormati dan tolong-menolong di dalamnya. Setiap anggota keluarga mempunyai andil yang sama besarnya untuk mencapai tujuan keluarga. Kesadaran akan tugas masing-masing, koordinasi dan hubungan yang baik antar anggota keluarga akan sangat membantu. Seseorang yang dapat *me-manage* kehidupan keluarganya dengan baik sudah mempunyai salah satu bekal untuk dapat mengatur negara dengan baik pula.

¹²²*Ibid*, h. 225.

Al Farabi, yang diakui oleh Ibnu Sina(w. 428 H/1037 M) sebagai gurunya telah menemukan teori “Negara Utama” (*al-Madīnah al Fâdilah*). Dalam hal ini, Ibnu Sina(w. 428 H/1037 M) mengikuti pendapat gurunya, yaitu lebih menerima pendapat Plato dengan paham “sosialis”nya ketimbang Aristoteles. Menurutnya paham Plato lebih sesuai dengan ajaran Islam yang lebih mementingkan masyarakat dari pada perseorangan.

Merasa kurang puas dengan teori gurunya, Ibnu Sina(w. 428 H/1037 M) membentuk teori negara baru yaitu “Negara Adil Makmur” yang mencakup tiga elemen penting, yaitu sebagai berikut:¹²³

a. *Al-Madīnah al-Fâdililah*(negara kolektif).

Setiap warga negara harus mengikuti dasar negara, yaitu; hidup gotong royong, saling membantu dan mempertahankan, serta melindungi akan harta serta kehormatan mereka bersama. Negara mempunyai disiplin yang keras terhadap warganya. Siapa saja yang memusuhi ideologi negara dan menentang hukum negara, dianggap

¹²³Zainal Abidin, *op. Cit.*, h 160.

sebagai musuh negara yang harus diperangi dan dibasmi. Hartanya dan kehormatannya halal. Dengan arti negara berhak menguasainya, dan menetapkan hukum yang menentukan nasib harta dan “kehormatan” itu.¹²⁴

b. *Al-Madīnah al-‘Ādilah* (negara adil).

Negara harus menjadi “negara-hukum” yang berdasarkan “keadilan”. Maksudnya negara-hukum yang mengutamakan dan berdasarkan keadilan. Negara ini merupakan tempat berlatih yang paling tepat untuk semua orang yang masih jauh tertinggal atau terbelakang peradabannya, sehingga mereka menjadi ahli dalam hukum dan keadilan.¹²⁵

Para warga boleh bekerja sebagai “pelayan” (pegawai) dalam tingkat yang pertama, sambil belajar untuk mencapai kecerdasan dan keahlian di bidang ilmu hukum. Negara yang warganya tidak mengerti hukum negara itu akan hancur dan terbelakang.¹²⁶

¹²⁴*Ibid.*, h. 269-270.

¹²⁵*Ibid.*, h. 271.

¹²⁶*Ibid.*, h. 272.

c. *Al-Madīnah al-Hasanah al-Siyrah* (negara moral).

Negara harus berdasarkan kepada sifat-sifat yang terpuji dan akhlak yang mulia.¹²⁷ Dipusatkannya persoalan akhlak ini terhadap penghormatan terhadap kedaulatan hukum. Adalah moral yang tinggi bagi negara yang sudah disahkan. Berhadapan dengan suatu undang-undang atau hukum yang “baru”, maka tidak ada alasan bagi warga negara untuk tidak mentaatinya, selama hukum itu masih berlaku.¹²⁸

Ketaatan kepada hukum dan peraturan negara, dianggap oleh Ibnu Sina(w. 428 H/1037 M) sebagai puncak dari moral yang tinggi. Maka sebagai suatu Negara Moralis, diwajibkan kepada seluruh warga negara supaya menitik beratkan moralnya atas ketaatan kepada hukum. Ketaatan kepada hukum dan undang-undang ini, merupakan “moral politik” yang sangat mulia.¹²⁹

¹²⁷*Ibid.*, h. 274.

¹²⁸*Ibid.*, h. 276.

¹²⁹*Ibid.*, h. 277.

Zainal Abidin mengutip dalam kitab *as-Siyâsah*¹³⁰, dan menjelaskan bahwa terdapat tiga unsur penting sebagai dasar untuk mewujudkan negara Adil Makmur. *Pertama*, negara adalah badan politik. *Kedua*, rumah tangga adalah sumber utama dari negara dan sumber inspirasi. *Ketiga*, pendidikan adalah jalan yang paling esensial untuk negara.

131

Untuk mewujudkan negara adil makmur, rakyat harus memiliki pendidikan yang bagus. Orang tua dan negara bertanggung jawab untuk memikirkan masa depan anak-anak. Ibnu Sina(w. 428 H/1037 M) berpendapat bahwa perkawinan dan rumah tangga bukan hanya menjadi soal suami istri dan anak, akan tetapi menjadi tanggung jawab negara juga. Negara harus mengatur persoalan-persoalan tersebut.

Setiap individu manusia terdapat perbedaan dari berbagai aspek termasuk akal, pandangan dan sikap

¹³⁰Kitab ini memperkatakan isu pengurusan manusia. Ia membincangkan kaedah mengurus diri, pendapatan dan perbelanjaan, keluarga, anak-anak dan para pekerja di bawah jagaan. Perbincangan ini didahului oleh penjelasan penting tentang hakikat diri dan masyarakat manusia serta kesannya kepada perkembangan hidup manusiaannya. Bandingkan Idris Zakaria, *Op. Cit.*, h. 112.

¹³¹Zainal Abidin Ahmad, *op. Cit.*, h 20.

terhadap sesuatu, pemilikan, kedudukan dan status. Perbedaan ini menurut Ibnu Sina(w. 428 H/1037 M) adalah suatu rahmat dari Allah SWT kerana jika manusia semuanya dijadikan sama dari berbagai aspek ia akan mengundang sikap saling bersaing antara mereka dan ini dilihat sebagai pendorong kepada suatu fenomena hasud dengki, bermusuhan dan dzalim-menzalimi sesama.

Kenyataan ini mengingatkan kita dengan ayat Surah al-Hujurat (49: 13) yang menegaskan tentang berbagai masyarakat manusia yang dijadikan Allah SWT untuk tujuan saling kenal mengenali dan bantu membantu di antara satu dengan yang lain.¹³²

Hal itu merupakan suatu perbedaan yang tidak mungkin disatukan walaupun ia tidak semestinya membawa kepada pertikaian dan perpecahan. Ia adalah perbedaan yang menuntut suatu sikap hormat menghormati di antara satu dengan yang lain dan meng-*iktiraf* persamaan dan

¹³²“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah SWT adalah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

perbedaan yang ada. Hakikat ini juga dapat dikaitkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. (w. 623 H) yang menegaskan bahawa *'al-ikhtilâf bayna ummatî rahmatan*. Karena perbedaan yang ada ini jika ditangani dengan bijaksana akan membawa kepada suatu suasana harmoni yang sehat.

Ibnu Sina(w. 428 H/1037 M) menggambarkan suatu realitas masyarakat manusia yang mendekati kepada idealnya sebuah negara, ketika memperjelaskan fenomena berbagai manusia di atas. Ia dilihat sebagai mendekati ideal karena apa yang ada dalam realiti masyarakat sangat berbeda dengan apa yang sepatutnya. Kalau semua orang adalah raja, tegas beliau, pasti akan berlaku persaingan kuasa; kalau semuanya rakyat pasti akan binasa (disebabkan tiada pemimpin yang memimpin mereka); kalau semuanya kaya maka tidak akan ada orang yang hendak bekerja untuk orang lain dan tidak akan ada orang yang akan menghulurkan bantuan kepada orang lain; dan akhirnya jika semua orang miskin pasti mereka akan sengsara tanpa bantuan. Keadaan itu, tegas Ibn Sina, boleh membangkitkan perasaan hasud dengki di kalangan manusia

khususnya, karena menurutnya, sifat hasad dan bermegah-megah itu merupakan potensi awal manusia untuk menciptakan kehancuran. Oleh itu, berbagai yang wujud dalam masyarakat manusia itu dilihat sebagai asas kemakmuran dan kekekalan umat manusia.¹³³

Suatu yang ideal yang digambarkan oleh Ibn Sina dalam menguraikan bagaimana berbagai manusia boleh membawa keharmonian ialah dengan membayangkan bahawa setiap golongan masyarakat memahami dan mengetahui kekurangan diri dan kelebihan orang lain. Golongan hartawan yang tidak berilmu menyadari akan kekurangan mereka dari aspek ilmu pengetahuan dan dengan itu menghormati golongan miskin yang berilmu. Manakala golongan miskin yang berilmu pula menyadari bahawa ilmu dan adab yang dimilikinya adalah lebih mulia dari sekadar harta dan dengan itu dia tidak akan cemburu dengan harta golongan kaya. Begitu juga di antara ilmuwan, penguasa dan seterusnya. Kesedaran kedua belah pihak dan komitmen di antara mereka terhadap kesedaran ini pastinya akan melahirkan sebuah masyarakat yang harmoni dan

¹³³ Lihat Ibn Sina, *Kitab al-Siyâsah*, h. 3.

saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Kesemua ini dilihat oleh Ibn Sina sebagai tanda-tanda hikmah dan rahmat Allah SWT.¹³⁴

Untuk mewujudkan Negara Adil Makmur, maka langkah awal adalah melakukan revolusi ekonomi. Menurut Ibnu Sina(w. 428 H/1037 M), revolusi ekonomi menjadi alat pertama untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Revolusi ekonomi bisa dilakukan dengan dua jalan yaitu:

1. Ekonomi rumah tangga merupakan tingkat pertama. Di dalam tingkat ini, istri dan anak merupakan partner utama. Seorang istri tidak hanya menjadi pendamping hidup, akan tetapi juga teman hidup yang paling terpercaya dalam soal pencarian rizki. Jadi, keluarga merupakan unit paling dasar dalam perkembangan ekonomi.
2. Mengembangkan ekonomi masyarakat. Jika ekonomi keluarga sudah bagus, maka secara otomatis ekonomi masyarakat juga bagus. Dengan ketentuan, setiap individu atau kelompok harus

¹³⁴*Ibid.*, h 3-4.

bekerjasama dengan keahlian masing-masing demi meningkatkan perekonomian masyarakat.

Skill atau ketrampilan dan management setiap individu sangat menentukan kemajuan perekonomian suatu masyarakat atau negara. Apabila setiap individu mampu melakukan dua hal itu, maka akan mampu mencapai ekonomi negara.

Jika ekonomi sudah mulai berkembang, maka langkah selanjutnya adalah membentuk negara. Negaralah yang nanti akan mengelola perputaran ekonomi yang ada di masyarakat. Maka dari itu, negara harus dikuasai oleh orang-orang yang ahli. Pada tahap ini, kepala negara yang awalnya adalah kepala keluarga harus bisa bersikap bijaksana untuk mengatur rakyatnya. Untuk mengatur rakyat, kepala negara memerlukan politik¹³⁵ yang baik. Kepala Negara bagaikan penggembala yang membawa domba-domba piaran ke lapangan untuk mencari rumput yang subur dan makmur. Jika penggembala

¹³⁵Kata politik pada mulanya terambil dari bahasa Yunani dan atau Latin *Politicos* yang berarti *relating to citizen*. Keduanya berasal dari kata *Polis* yang berarti Kota. Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata politik sebagai “segala urusan dan tindakan(kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain.” Lihat Quraisy Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Perbagai Persoalan Umat*, cetakan ke 13, (Bandung: Mizan, 1996), h. 409.

baik, maka dia hanya memberikan isyarat kepada domba-domba supaya berjalan teratur menuju lapangan yang makmur. Tetapi, kalau penggembala ini menyimpang dari tujuan awal, maka dia akan menghadapi kegagalan dengan melihat kemitian domba-dombanya. Ini adalah sebuah perumpamaan untuk pemimpin yang memiliki tujuan benar dan menyimpang.

Untuk mewujudkan ekonomi yang bagus, maka membutuhkan “politik ekonomi” yang tegas. Sehingga, akan tercapai keadilan dan kemakmuran secara menyeluruh. Tujuan politik ekonomi negara adalah:

- a) Menyeragamkan seluruh masyarakat dalam mewujudkan perekonomian serta kerja sama setiap golongan untuk tujuan pembangunan secara total.
- b) Menstabilkan perekonomian, sehingga rakyat dan negara tidak mudah diperdaya oleh pihak lain. Negara harus mempertahankan nilai ekonomi agar tidak sampai terjerumus kepada cengkaraman materialistik, yang menganggap bahwa benda lebih tinggi dari pada nilai yang sehat. Jangan sampai melakukan cara-cara haram, bahkan

menjadikan cara-cara haram sebagai kebudayaan ekonomi, sehingga akan merusak akhlak semua orang.

- c) Harta milik berasal dari dua sumber, yaitu warisan dan hasil kerja. Harta warisan adalah harta yang diterima dari famili yang meninggal. Sedangkan harta hasil kerja adalah harta usaha yang diperoleh dengan bekerja.
- d) Wajib bekerja untuk mendapatkan harta yang halal dan bermanfaat. Setiap orang wajib berusaha(*kasab*) untuk menambah pendapatan(*income*) sehari-hari. Setelah memperoleh pendapatan, setiap orang menginfakkan harta kepada orang-orang yang membutuhkan. Sirkulasi pendapatan dan pengeluaran dilakukan secara halal. Dengan demikian, setiap orang akan merasakan kesejahteraan dalam hidupnya.
- e) Pemasukan dan pengeluaran harus secara halal. Ibnu Sina(w. 428 H/1037 M) menganjurkan rencana anggaran belanja. Mendahulukan kewajiban dari pada keinginan. Sebab, jika tidak dianggarkan, maka manusia akan mengeluarkan uang untuk sesuatu yang tidak berguna. Ada pengeluaran wajib, seperti *nafaqah* dan amal kebajikan(*amar ma'ruf*). *Nafaqah* adalah segala biaya

kebutuhan hidup sehari-hari dan berpegang teguh dengan prinsip sederhana dan hemat, sedangkan amal kebajikan adalah segala perbuatan untuk masyarakat dan negara. Pemborosan dalam hidup sehari-hari, tidak hanya merusak jiwa manusia, tetapi juga jiwa orang lain. Sebab, kemewahan akan menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Selain nafaqah, ada kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh manusia, yaitu zakat dan sadaqah.

Dorongan Ibnu Sina(w. 428 H/1037 M) untuk hidup bernegara jauh lebih kuat dari pada filsuf Yunani dan al-Farabi. Ibnu Sina(w. 428 H/1037 M) tidak memberi tempat bagi masyarakat manusia yang tidak bernegara, sebagaimana yang dikonsepsikan oleh al-Farabi dengan nama masyarakat yang belum sempurna. Nama demikian, tidak ada dalam konsepsi Ibnu Sina(w. 428 H/1037 M).

Hukum menjadi alat utama di dalam sebuah negara untuk mengatur kehidupan rakyat. Sehingga, tidak ada satupun rakyat yang mengedepankan pikiran masing-masing yang akan menyebabkan perselisihan diantara mereka. Maka dari itu, antara pemerintah dan rakyat harus bekerjasama untuk menegakkan keadilan hukum.

Dasar utama dalam menetapkan hukum dan menegakkan keadilan di suatu negara adalah Iman. Iman harus menjadi dasar utama dalam diri seseorang. Sebab, dengan adanya iman, manusia tidak akan terlena dengan kenikmatan duniawi yang sifatnya hanya sesaat. Oleh karena itu, manusia memerlukan peran Nabi dalam memahami dan melaksanakan keimanan. Dalam hal ini, Ibnu Sina(w. 428 H/1037 M) menganggap perlu adanya partisipasi dari negara yang akan membuat undang-undang. Undang-undang yang ditetapkan negara harus sesuai dengan nilai-nilai keimanan. Jadi, adanya negara merupakan fasilitator untuk mendakwahkan ajaran Islam demi mewujudkan misi Nubuwwah. Dengan kata lain, negara harus berperan aktif untuk menerangkan “iman” kepada umat demi melanjutkan misi Nubuwwah(ke-Nabi-an).¹³⁶

Dalam kitab *as-Syifâ'* terdapat tiga prinsip yang harus diatur dalam undang-undang, yaitu Pertama, Prinsip-prinsip politik. Kedua, prinsip-prinsip kebijaksanaan tentang ekonomi. Ketiga, prinsip-prinsip mengenai rumah tangga atau keluarga.

¹³⁶Ibnu Sina, *as-Syifâ', op. Cit.*, h. 183.

Pertama, Prinsip politik. Ibnu Sina(w. 428 H/1037 M) membagi tugas negara kepada tiga golongan dengan keahlian masing-masing, yaitu:

1. Pemerintah, yang terdiri dari legislatif, eksekutif, dan Yudikatif. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, maka segala keputusan harus melalui musyawarah.
2. Pengusaha, yang merencanakan, mengelola, dan melaksanakan seluruh aktivitas perekonomian.
3. Keamanan, seluruh lembaga negara yang memiliki tugas membela dan menjaga keamanan warga negara.

Setiap golongan harus mempunyai pemimpin dan anggota yang akan mengatur atau mengelola seluruh aktivitas yang akan dijalankan. Agar proses pengelolaan berjalan dengan baik, maka pemimpin dan jajarannya membuat undang-undang sebagai pedoman dan ikatan bagi seluruh elemen yang ada di dalamnya.

Ibnu Sina(w. 428 H/1037 M) menganjurkan bahwa setiap orang harus memiliki semangat kerja, loyalitas kepada negara, dan produktif, sehingga tidak ada pengangguran dan

manusia parasit yang hanya mengandalkan pertolongan dari orang lain. Namun, apabila ada orang yang benar-benar tidak mampu kerja, maka negara harus menjamin kebutuhan hidupnya. Maka dari itu, menurut Ibnu Sina(w. 428 H/1037 M), negara harus mempunyai harta kolektif (*Mâl Musytarak*), yaitu harta negara yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara kolektif. Dari sini, kita bisa mengetahui bahwa Ibnu Sina(w. 428 H/1037 M) memiliki pendirian yang teguh terhadap persoalan sosial.

Kedua, prinsip kebijaksanaan tentang ekonomi. Dalam prinsip ini, ada keterkaitan dengan prinsip pertama, yaitu pengelolaan ekonomi dengan sebaik-baiknya. Harta kolektif harus digunakan untuk kepentingan masyarakat bersama. Adapun pengangguran, pemalas kerja, dan orang yang suka melakukan aktivitas yang tidak bermanfaat, maka negara harus bersikap tegas dengan mengatur di dalam undang-undang dan menegakkan keadilan.

Ketiga, prinsip sosial(rumah tangga atau keluarga). Pembicaraan mengenai prinsip-prinsip sosial, Ibnu Sina(w. 428 H/1037 M) memusatkan kepada persoalan perkawinan. Baik mengenai perkawinan, peneguhan hubungan suami istri,

perceraian, nafkah, dan soal pendidikan anak. Salah satu penjelasannya adalah pemeliharaan kesucian atau kehormatan. Dalam hal ini, Ibnu Sina(w. 428 H/1037 M) menitikberatkan persoalan kepada suami dengan cara memperlihatkan kesuciannya kepada istri, sehingga istri yakin dan percaya. Seorang suami memelihara kehormatan dengan tiga usaha, yaitu memperbaiki tingkah laku, bersikap keras tentang pengawasannya(hijab). Dengan demikian, istri berusaha membuat aktivitas-aktivitas yang menggembirakan bagi suami. Ibnu Sina(w. 428 H/1037 M) memberi penghargaan tinggi kepada perempuan sebagai seorang istri, dan mewajibkan laki-laki untuk menggauli secara baik. Perempuan sebagai istri memiliki tiga kedudukan, yaitu sebagai teman serikat di dalam hak milik suami, penjaga dari harta benda suami, dan wakil ketika suami tidak ada. Semua persoalan ini harus diatur dalam undang-undang, agar supaya tidak merugikan atau menyengsarakan antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, semua aktivitas warga di negara adil makmur diatur di dalam perundang-undang Negara. Semua persoalan ini harus diatur dalam undang-undang, agar supaya tidak merugikan atau menyengsarakan antara satu dengan yang lain. Ibnu Sina(w.

428 H/1037 M) tidak hanya mengatur aktivitas masyarakat, akan tetapi juga aktivitas rumah tangga, sebab rumah tangga adalah unit terkecil dari negara.¹³⁷ Oleh karena itu, semua aktivitas warga di negara adil makmur diatur di dalam perundang-undang negara.

Tujuan dengan adanya undang-undang adalah mengatur akhlak dan kebiasaan yang baik bagi rakyat, yaitu sifat pertengahan antara nafsu dan semangat berani. Dengan memakai sifat pertengahan itu, kekuatan nafsu memberi faedah bagi badan dan turunan, sedangkan keberanian sangat dibutuhkan untuk kepentingan negara. Kekuatan lain yang harus diatur dalam undang-undang adalah mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Jika warga bisa melaksanakan akhlak ini, maka akan tercipta keharmonisan antara satu dengan yang lain. Sedangkan kekuatan terakhir adalah akhlak untuk tidak bersifat kikir. Kikir merupakan sifat tercela bagi manusia yang akan mengantarkan manusia pada kesesatan dunia dan akhirat.

¹³⁷*Ibid.*, 185-186.

Demikian pandangan yang sangat mendalam dari Ibnu Sina(w. 428 H/1037 M). Semua persoalan yang dikemukakan, sangat berharga dan menjadi bahan perenungan generasi umat Islam khususnya, dan umat manusia pada umumnya.

3. Kepala Negara

Begitu aktifnya aliran Syi'ah Isma'iliyah ditanamkan kepada Ibnu Sina(w. 428 H/1037 M), dan penanaman itu dilakukan sudah semenjak mudanya, tetapi jiwa kesadarannya terutama dalam politik terus memberontak dan menolak aliran itu. Dia tidak menerima faham “*imam*” ala Syi'ah yang secara populer disebut dengan sistem “*monarchal theocracy*” yang mengatakan bahwa Kepala Negara harus dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Tetapi Ibnu Sina(w. 428 H/1037 M) tetap berpegang teguh kepada ajaran Islam, yang dipelajari dan diolahnya sehingga merupakan suatu pendirian yang dinamakan “*socialistic democracy*”. Dan secara tegas Ibnu Sina(w. 428 H/1037 M) berkata bahwa Kepala Negara adalah seorang manusia biasa yang dipilih oleh rakyat dan memimpin negara menurut ajaran Tuhan dan petunjuk-petunjuk dari

Nabi, Khulafaur Rasyidin dan para pemimpin Islam setelahnya.¹³⁸

Dalam kitab *as-Syifâ'* tentang pengangkatan kepala negara melalui dua jalan: *pertama*, pencalonan dari kepala negara yang sebelumnya. Karena pengalaman dan wawasan seorang kepala negara sebelumnya, dia mampu menentukan kriteria calon kepala negara selanjutnya yang sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi negara. *Kedua*, kepala negara dipilih oleh rakyat. Rakyat, memegang peranan penting untuk menentukan kepala negara yang sesuai dengan kualitas diri pemimpin, agar nanti mampu menyejahterakan rakyat.¹³⁹

Syarat-syarat kepala negara menurut Ibnu Sina(w. 428 H/1037 M) adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai kecerdasan akal yang mendalam
2. Memiliki akhlak mulia
3. Memiliki keberanian

¹³⁸Zainal Abidin Ahmad, *Negara Adil Makmur: Ibnu Sina*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 152.

¹³⁹Ibnu Sina, *op. Cit.*, h. 187-188. Lihat di Zainal Abidin Ahmad, *Negara Adil Makmur: Ibnu Sina, op. Cit.*, h. 259.

4. Memiliki visi dan misi yang jelas
5. Mengerti hukum syari'ah secara baik yang termanifestasi dari pemikirannya, serta disetujui secara umum

Ibnu Sina(w. 428 H/1037 M) tidak memasukkan syarat Filosof yang bersifat Nabi sebagai syarat dari seorang pemimpin. Yang terpenting bagi Ibnu Sina(w. 428 H/1037 M) adalah pemimpin harus cerdas, berakhlak mulia, dan mengetahui secara mendalam tentang syari'ah Islam sebagai landasan utama pelaksanaan suatu pemerintahan. Secara jelas, memang hampir tidak ada pembahasan yang terperinci mengenai bentuk atau tipe seorang pemimpin menurut Ibnu Sina(w. 428 H/1037 M). Akan tetapi, apabila mengkaji dari pernyataan Ibnu Sina(w. 428 H/1037 M) berikut ini,

“Manakala kebenaran ini sudah nyata, maka pastilah hidup manusia berkumpul bersama manusia lainnya, dan berkumpul ini tidaklah sempurna tanpa adanya masyarakat, hidup dengan segala sebab-sebab yang harus dilakukannya. Masyarakat membutuhkan hukum sunnah dan keadilan. Adanya hukum dan keadilan membutuhkan pembuat hukum dan pelaksana

keadilan. Pembuat hukum dan pelaksana keadilan harus mampu berbicara dengan rakyat(dalam bahasa yang mudah dipahami), dan sanggup menjadikan mereka mentaati segala peraturan hukum itu. Pembuat hukum dan pelaksana keadilan itu haruslah manusia(dari kalangan rakyat).¹⁴⁰

Pernyataan Ibnu Sina(w. 428 H/1037 M) di atas bertujuan untuk menjelaskan bahwa kepemimpinan yang diharapkan oleh Ibnu Sina(w. 428 H/1037 M) itu harus bersandarkan pada hukum Islam.

Sebagai kepala negara harus berhubungan erat dengan rakyat, terutama dalam upacara-upacara keagamaan. Seorang kepala negara harus bersikap sebagai bapak bagi rakyat, sehingga rakyat merasa nyaman dan tentram dalam lindungannya. Kepala negara senantiasa berada di tengah-tengah rakyat, sehingga antara rakyat dan kepala negara bisa saling mengenal dengan baik. Contoh demikian, sudah ada di zaman Nabi Muhammad dan Khulafâur Râsyidîn. Akan tetapi, Ibnu Sina(w. 428 H/1037 M) menyadari bahwa

¹⁴⁰Ibnu Sina, *op. Cit.*, h. 182.

cara ini tidak bisa sepenuhnya diterapkan di zaman sekarang.¹⁴¹

Meskipun Ibnu Sina(w. 428 H/1037 M) mengakui bahwa dosa yang paling besar adalah memberontak kepada pemerintah yang sah, namun dia mendukung para pemberontak untuk membasmi orang-orang yang ingin merusak negara. Jika penyelewengan ini sudah terbukti, maka dianjurkan oleh Ibnu Sina(w. 428 H/1037 M) untuk melakukan pemberontakan, dan seluruh rakyat harus berpartisipasi di dalam revolusi itu. Untuk menggerakkan rakyat supaya melakukan revolusi, maka dibutuhkan pemimpin yang berjiwa baik. Dengan demikian, faktor penting yang menentukan soal ini adalah kecakapan dalam memimpin negara. Sebagaimana statement Ibnu Sina(w. 428 H/1037 M) yang dikutip oleh Zainal Abidin Ahmad dalam buku Negara Adil Makmur menurut Ibnu Sina(w. 428 H/1037 M):

“Faktor yang menentukan dalam hal ini adalah jiwa(akal) yang baik dan kepemimpinan yang baik. Siapa yang dalam hal-hal lain sederhana tetapi

¹⁴¹Zainal Abidin Ahmad, *op. Cit.*, h. 266.

memenuhi tentang kedua hal di atas, dengan syarat tidak terlalu jauh dari kedua hal itu dan tidak pula berlawanan, maka dia lebih berhak untuk dikemukakan dari pada orang lain yang tidak memiliki keduanya. Sebab, orang-orang yang lebih banyak ilmunya harus menyokong pemimpin yang berjiwa besar dan sanggup memimpin. Seorang pemimpin harus bersandar kepada ahli-ahli ilmu dan selalu bermusyawarah dengan mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib.”¹⁴²

Seorang kepala negara harus taat kepada Allah SWT, para pemimpin dan pegawai pemerintahan yang terpilih itu harus dapat mengenali dan memerintah (mengontrol) dirinya sendiri sebelum mereka memerintah orang lain. Mereka yang terpilih itu seharusnya dapat mengenali diri mereka tentang apa kelebihan dan kekurangan dirinya, sehingga dapat terus memperbaiki diri dan menjaga dirinya dari perbuatan yang tidak baik. Kita ketahui pula bahwa seorang pemimpin adalah teladan bagi orang yang dipimpin.¹⁴³

¹⁴²*Ibid.*, h. 264.

¹⁴³Ibnu Sina, *As-Siyâsah*, (Suria: Bidayat li ath-Thaba'ah wa al-Nasyr, 2007), Cet. 1, hlm. 90.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN AL-FARABI DAN IBNU SINA TENTANG KONSEP NEGARA IDEAL

A. Persamaan dan Perbedaan Konsep Negara Ideal al-Farabi dan Ibnu Sina

Al-Farabi dan Ibnu Sina membahas Negara Ideal dimulai dengan persoalan manusia sebagai makhluk social (*homo socius*). Fitrah manusia sebagai makhluk sosial menjadi sebab pertama terbentuknya masyarakat dan negara.

Tujuan terbentuknya negara ideal al-Farabi dan Ibnu Sina adalah untuk mencapai kebahagiaan (*al-Sa'âdah*), baik di dunia maupun di akhirat. Dengan adanya kerjasama antar warga negara, maka akan tercipta kebahagiaan material dan spiritual.

Untuk mewujudkan negara ideal, kedua tokoh mengkonsepsikan agar negara dipimpin oleh adil dan

bijaksana. Selain seorang pemimpin negara, kedua tokoh juga mensyaratkan agar setiap warga memiliki kecerdasan rasio dan spiritual. Namun, jalan yang ditempuh untuk mewujudkan negara ideal dari kedua tokoh ini berbeda.

Kedua-duanya dalam konsep negara ideal dan kepala negara ideal, sama-sama menggunakan teori agama (al-Qur'an dan Hadist) dan juga beberapa pendapat Plato maupun Aristoteles.

Al-Farabi dan Ibnu Sina memiliki kesamaan dalam hal bagaimana negara dan agama berhubungan selaras. Negara tidak dapat dipisahkan dari agama. Karena menurutnya negara berhubungan erat dengan agama. Islam telah mengatur seluruh cabang kehidupan termasuk didalamnya adalah negara. Negara harus dijalankan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Sehingga para pemimpin atau kepala negara haruslah orang yang taat kepada-Nya. Agama dan negara harus berjalan dengan serasi. Agama tanpa negara akan mudah lenyap dan negara tanpa agama akan mudah hancur. Agama membutuhkan negara untuk dapat melaksanakan aturan agama yang ada secara maksimal. Negara

membutuhkan agama untuk dapat mencapai tujuan politik yakni menjamin kemakmuran semua pihak.

Imam al-Ghazali berkata: “*Karena itu, dikatakanlah bahwa agama dan kekuasaan adalah dua saudara kembar. Dikatakan pula bahwa agama adalah pondasi (asas) dan kekuasaan adalah penjaganya. Segala sesuatu yang tidak berpondasi niscaya akan roboh dan segala sesuatu yang tidak berpenjaga niscaya akan hilang lenyap.*”¹⁴⁴

Berbicara mengenai asal mula negara, al-Farabi dan Ibnu Sina memiliki perbedaan. Al-Farabi mengatakan bahwa karena masyarakat tidak bisa hidup sendiri maka butuh negara sebagai pelayan masyarakat. Sedangkan menurut Ibnu Sina, negara terwujud karena sejak awal manusia adalah makhluk ekonomi. Sebagai makhluk ekonomi yang selalu butuh akan kebutuhan-kebutuhan, maka agar dalam meraih kebutuhan itu tidak menimbulkan perselisihan maupun pertengkaran dan perpecahan, oleh karena itu diperlukan sebuah kelompok atau negara yang

¹⁴⁴ Al-Ghazali, *al-Iqtishad fil I'tiqad*. hlm. 199.

mampu melindungi dan menjaga mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Al-Farabi membicarakan negara utama dengan menitikberatkan soal kepala negara kemudian rakyat. Al-Farabi terpengaruh ide politik dari filsafat Yunani, yaitu Kepala Negara harus seorang *Philosopher-King* (Raja yang bersifat Filsuf). Tapi, al-Farabi sedikit lebih maju dengan berpendapat bahwa Kepala Negara harus berasal dari kalangan *Philosopher-Prophet* (Filsuf yang bersifat Nabi).

Berbeda halnya Ibnu Sina. Dia sedikit sekali membicarakan soal “Kepala Negara”, karena menurut pendapatnya Kepala Negara bukanlah sumber kekuasaan dari negara, tetapi adalah hasil atau akibat dari kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Sebab itu dia membicarakan terlebih dahulu soal “rakyat”, baik sebagai “pribadi” masing-masing maupun didalam hubungannya di dalam ikatan hidupnya yang pertama kali, yaitu “keluarga”.

Menurut Ibnu Sina, syarat bagi kepala Kepala Negara adalah harus mempergunakan dan berpegang

teguh kepada dua warisan yang ditinggalkan oleh Nabi dan filosof, yaitu warisan syari'at (hukum-hukum Islam), dan warisan hukum negara dan perundang-undangan.¹⁴⁵

Meskipun begitu, Ibnu Sina selangkah lebih maju dari al-Farabi. Jika al-Farabi lebih mendalami dan menelan faham-faham politik Yunani, maka Ibnu Sina mengujinya dan memperpadukannya dengan kaidah-kaidah Islam. Sehingga menjadi prinsip yang padu dan lebih komprehensif.

Pemikiran al-Farabi dilatarbelakangi oleh kehidupan sosialnya yang menunjukkan bahwa filsafat al-Farabi merupakan bagian integral dari mazhab intelektual dan kultur islam pada zamannya. Pemikiran al-Farabi merupakan hasil kreativitas filosof muslim yang orisinal.

Hal ini sejalan dengan argument kebudayaan yang menembus berbagai macam gelombang di mana ia bergumul dan berinteraksi. Pergumulan serta interaksi ini,

¹⁴⁵Zainal Abidin Ahmad, *Negara Adil Makmur: Menurut Ibnu Sina*, hlm.

tentunya melahirkan pemikiran baru yang tidak harus mengkonsekwensikan perbudakan atau perhambaan. Di samping itu, keterlibatan al-Farabi pada Aristoteles dan Plato tidak mencerminkan suatu perbuatan mengekor, sebab al-Farabi yang mendapat didikan secara Islami dan dijejali dengan ruh peradaban Islam melakukan upaya harmonisasi di antara kedua filosof tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa al-Farabi menunjuk agama islam sebagai agama Masehi yang ditransformasikan kepada bangsa Arab sebagai pengoreksi. Dan filsafat yang ditransformasikan kepada bangsa Arab adalah filsafat Yunani yang menjadi dasar bagi agama Masehi, dan selanjutnya menjadi dasar bagi agama islam itu sendiri. Demikian juga pemikiran tentang Negara Utama berbeda dengan yang diajukan Plato, Negara Utama al-Farabi mencerminkan suatu tuntutan sinergi bagi perpaduan antara rasionalitas (*aql*), agama (*din*) dan kebangsaan (*nation*). Dengan demikian bahwa filsafat al-Farabi lahir dari landasan ideologis yang dihadapinya. Ia murni sebagai filosof Muslim dan bukan foto copy Yunani.

Dimensi pemikiran *al-Madînah al-Fâdlilah* al-Farabi yang dituangkan dalam karta monumentalnya *al-Madînah al-Fâdlilah* menghendaki suatu bentuk negara yang didalamnya bertujuan untuk bekerja sama dalam mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Yang diperoleh oleh seorang penguasa yang memiliki berbagai ilmu pengetahuan, yang mampu memahami dengan baik segala apa yang harus dilakukannya, dan mampu membimbing dengan baik sehingga orang melakukan apa yang diperintahkannya. Dengan memanfaatkan segala potensi orang-orang yang memiliki kemampuan, ia mampu menentukan, mendefenisikan, dan mengarahkan tindakan-tindakan ke arah kebahagiaan.

Pendirian politik al-Farabi didasarkan atas konsepsi usaha bersama dari manusia untuk mencapai kebahagiaan yang tertinggi, dengan pikiran dan tindakan yang baik, bekerjasama dengan masyarakat, demi terwujudnya kehidupan yang sejati dan harmonis. Seorang Kepala Negara harus mencerdaskan kehidupan rakyatnya untuk mencapai kebahagiaan yang sejati, maka sejatinya seorang kepala negara adalah seorang Nabi.

Jika tidak ada, maka harus diadakan pemilihan untuk mendapatkan orang yang ahli serta mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Sehingga pada gilirannya dapat terwujud masyarakat dan pemerintahan yang baik. Konsep kenegaraan yang dikembangkan al-Farabi pada prinsipnya mengarah pada system autokrasi, dalam arti seorang pemimpin memiliki kekuasaan mutlak untuk mengatur Negara. Dengan konsep ini, ia mempersyaratkan tingginya moral sang pemimpin. Namun, jika tidak ada seorangpun yang memenuhi dua belas kualitas luhur itu, maka boleh dua atau beberapa orang yang memegang jabatan kepala negara(kolektif). Pendirian al-Farabi berbeda dengan Ibnu Sina. Ibnu Sina menghendaki pilihan rakyat dan yang menjadi kepala negara hanya satu orang.¹⁴⁶

Menurut Ibnu Sina, pekerjaan seorang Nabi lebih fundamental dibanding Filosof, karena secara absolut Nabi memiliki peran untuk memakmurkan negara. Dengan

¹⁴⁶*Ibid.*, hlm. 26.

arahan-arahan Nabi, maka rakyat bisa mendapatkan ilmu pengetahuan demi menuju keberhasilan.¹⁴⁷

Berbeda dengan Ibnu Sina. Teori Ibnu Sina tentang Negara Adil Makmur lebih berorientasi dari bawah ke atas (*bottom up*) dari pada atas ke bawah (*top down*). Dia membicarakan sedikit sekali soal Kepala Negara. Menurut Ibnu Sina, kepala negara bukanlah menjadi sumber kekuasaan dari negara, tetapi kepala negara merupakan akibat dari kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, dia membicarakan dahulu soal rakyat, baik sebagai pribadi maupun di dalam hubungan dengan ikatan pertama, yaitu keluarga. Pembahasan ini dapat diketahui dari buku Ibnu Sina, *as-Syifâ* dan *as-Siyâsah*. Kedua buku ini mengandung tiga pokok penting: Pendidikan, Rumah Tangga, dan Politik. Adanya kepala keluarga, menyebabkan lahirnya kepala negara. Di keluarga adalah tempat latihan bagi Bapak untuk menjadi pemimpin atau kepala negara.

¹⁴⁷*Ibid.*, hlm. 149.

Kehadiran rakyat memegang peranan penting dalam menentukan kemajuan negara. Ibnu Sina mengatur kehidupan rakyat dari aktivitas sederhana sampai aktivitas yang berkonsekuensi tinggi. Ibnu Sina sangat menekankan bahwa negara harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan rakyat. Kepala Negara tidak boleh membiarkan rakyat menderita, bahkan menjadi budak di negeri sendiri. Konsepsi Ibnu Sina tentang Negara Adil Makmur lebih banyak melibatkan rakyat sebagai subjek. Namun, Ibnu Sina lebih sedikit menyinggung Kepala Negara dari pada al-Farabi. Sebab, menurut Ibnu Sina, Kepala Negara terlahir dari keberadaan rakyat. Maka dari itu, pembahasan rakyat lebih utama dibanding Kepala Negara. Di dalam konsepsi Ibnu Sina tentang Negara Adil Makmur tidak ada klasifikasi negara bodoh, rusak, dan lain-lain. Sebab, Ibnu Sina mengatur segala aspek kehidupan masyarakat mulai dari hal kecil sampai hal yang berefek besar.

Dorongan Ibnu Sina kepada hidup bernegara, jauh lebih kuat dari filosof-filosof Yunani dan dari al-Farabi. Dia tidak memberi tempat bagi masyarakat

manusia yang tidak bernegara, sebagai yang diberikan oleh al-Farabi dengan nama “*masyarakat yang belum sempurna*” (*ghairu kamilah*).

Kemudian, mengenai buku *Republic* karya Plato, Ibnu Sina menjadikan buku tersebut sebagai “sumber inspirasi” untuk maju selangkah membuat teori politik yang dikarangnya. Langkah yang seperti ini dia sudah didahului oleh gurunya, al-Farabi, yang mengarang buku politik yang begitu banyaknya.

Namun perbedaannya adalah kalau al-Farabi berhenti sampai di situ dan merasa puas dengan teori “Negara Utama” sebagai yang dicita-citakan oleh Plato dengan menamakannya “Perfect State” atau “Model City”. Hal ini menunjukkan bahwa al-Farabi tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh Plato dapat dilihat di karangan al-Farabi, yaitu dalam kitab *Ârâ’ Ahl al-Madînah al-Fâdlilah*. Namun itu tidak serta merta al-Farabi menjiplak semuanya, penggabungan filsafat dan agama menjadi produk orisinal dari karya al-Farabi.

Sedangkan Ibnu Sina maju dengan langkah yang lebih panjang, dengan membentuk teori baru yang dilengkapi dengan ajaran-ajaran agamanya, Islam.

Ibnu Sina bukan hanya berteori dan tidak semata-mata menulis dan mengarang, tetapi juga ikut berpraktek di dalam pemerintahan dan mencobakan segala ide yang dianutnya, walaupun dia sendiri mengakui bahwa dia gagal di dalam praktek. Sedangkan al-Farabi belum pernah mempraktekan teorinya tentang *al-Madînah al-Fâdlilah*.

B. Relevansi Pemikiran al-Farabi dan Ibnu Sina dengan Politik di Indonesia

Pemikiran politik merupakan persoalan yang paling digeluti oleh kaum intelektual muslim selama dua abad ini. Hal ini dapat dilihat diberbagai negeri muslim mengenai perjuangan yang tengah berlangsung untuk mendapatkan kemerdekaan dan bebas dari ketergantungan barat baik dalam kolonialisme maupun hegemoni, termasuk hegemoni pemikiran. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi, pertama, pesona politik yang kuat bagi banyak orang, sehingga sering memunculkan persoalan.

Tidak heran, dari sanalah lahir persoalan teologi. Kedua, provokasi sebagian pengamat barat yang melihat Islam secara politik dalam pandangan yang monolitik yang berkonotasi otoriter. Karena itu, para intelektual Muslim ingin memperlihatkan bahwa meskipun pandangan itu dalam beberapa hal dapat dibenarkan, tapi tidak untuk keseluruhan Islam, terutama jika dilihat dari pemikirannya. Sebab, khazanah intelektual Islam sangatlah luas dan bersifat multitafsir, sehingga bagi mereka sulit menerima klaim otoritarianisme Islam secara keseluruhan dari pengamat barat.¹⁴⁸ Tidak hanya dua abad terakhir ini, tapi sejak dulu pemikiran politik telah digandrungi oleh para intelektual muslim. Di antara mereka adalah al-Farabi dengan pemikiran Negara Utama dan Ibnu Sina dengan Pemikiran tentang Negara Adil Makmur.

Jika pemikiran filsafat berupaka politik atau kenegaraan, maka pemikiran tersebut akan berhubungan dengan kearifan dan etika dalam berpolitik. Pada

¹⁴⁸ Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik*, Jakarta: Kencana, 2013, h. 1

pemikiran agama, ia akan melahirkan karya yang akan mengilhami dan menjadi sumber rujukan dalam beragama. Politik dapat menjadi partner bagi agama untuk mensejahterakan hidup masyarakat, serta untuk menuai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hal itu yang dilakukan al-farabi dan Ibnu Sina dengan pemikiran politiknya, yang mana mereka memadukan secara harmonis dengan politik dan agama sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan hidup.

Gagasan negara ideal al-Farabi dengan “filusuf yang berkarakter nabi”nya dan Ibnu Sina dengan “revolusi ekonomi”nya, bukanlah konsep untuk digunakan sebagai pedoman praktis dalam mengatur negara, tetapi merupakan suatu cita-cita sebagai upaya untuk memberikan gambaran atau panduan kepada arah negara yang sejahtera. Sehingga penelitian tentang pemikiran keduanya bukanlah sekedar *academi exercise* saja, tapi juga bisa menjadi solusi atau problem solving bagi kehidupan politik saat ini. Hal ini pula sangat relevan ketika bangsa Indonesia pasca reformasi ini mulai membangun jati dirinya.

Gagasan atau pemikiran al-Farabi dan Ibnu Sina yang telah dikemukakan lebih dari 10 abad silam bukanlahlah wacana yang kaku dan tak bisa pengaruhnya terhadap perkembangan atau realitas politik yang ada di Indonesia sekarang. Pengaruh yang nyata tersebut salah satunya adalah konsep kepemimpinan al-Farabi dan revolusi ekonomi Ibnu Sina yang menjadi permasalahan Indonesia saat ini.

1. Relevansi Konsep Kepemimpinan al-Farabi dengan Politik di Indonesia

Dalam *Ârâ Ahl Al-Madînah Al-Fadlîlah*, warga negara merupakan elemen penting dalam suatu negara, karena warga negara yang menentukan bentuk, sifat, serta jenis negara. Namun lebih dari itu, al-Farabi menganggap pemimpin negara sebagai faktor terpenting bagi maju atau mundurnya suatu negara. Kepala negara, menurut al-Farabi, bagaikan jantung bagi tubuh manusia.

Karena sangat pentingnya kepala negara sehingga al-Farabi berpandangan bahwa tidak semua warga bisa menjadi kepala Negara Utama. Hanya orang-orang yang

paling sempurna dan memiliki sifat profetiklah yang berhak memimpin warga di Negara Utama. Lebih menarik lagi, al-Farabi berpendapat bahwa kepala Negara Utama harus diadakan terlebih dahulu, setelah itu barulah membentuk Negara dengan bagian-bagiannya. Sehingga, dengan mudah Kepala Negara Utama mampu menentukan wewenang, tugas, dan kewajiban serta martabat dan posisi masing-masing warga Negara. Apabila, Kepala Negara Utama menemui warga Negara yang tidak baik, maka Ia dapat menghilangkan ketidakbaikan tersebut.¹⁴⁹ Oleh karena itu, negara harus mempunyai pemimpin yang kuat, unggul, dan sempurna. Sempurna yang dimaksud al-Farabi adalah orang yang mempunyai sifat-sifat kenabian. Jujur dalam berkata, amanah jika diberikan tanggung jawab, menyampaikan hal-hal yang ma'ruf dan melarang terhadap kemungkaran, serta cerdas secara intelektual.

Haji Agus Salim dalam filosofi kepemimpinannya mengatakan bahwa memimpin bukanlah hanya sekedar bekerja keras, tapi harus juga

¹⁴⁹ Zainal 'Abidin Ahmad, *Negara Utama: Teori Kenegaraan dari Sardjana Islam al-Farabi*, Jakarta: P.T. KINTA, 1968, h. 99.

dibarengi dengan hidup sederhana dan peduli kepada nasib rakyat kecil secara konsisten.¹⁵⁰ Seorang (calon) pemimpin rela bekerja keras, blusukan, bersusah payah, menghabiskan banyak dana, peduli dengan rakyat, dan sebagainya pada saat ini ingin mencapai kedudukan sebagai penguasa. Akan tetapi, setelah ia benar-benar duduk di kursi kekuasaan, keteladanan-keteladanan seperti itu tidak lagi pernah terlihat. Menjadi pemimpin merupakan langkah besar untuk mengubah negara menjadi sejahtera. Namun, jika pemimpin menganggap bahwa pemimpin hanya untuk memperoleh kekuasaan untuk mobilitas sosial demi perbaikan status dan ekonominya saja, maka akan mengakibatkan disorientasi dalam memimpin.

Arah bangsa akan menjadi semakin tidak jelas, jika pemimpin mempunyai cita-cita yang salah. Apalagi pemimpin tidak mampu berdikari. Hanya menjadi pemimpin boneka, sehingga langkah geraknya terbatas. Akhirnya, bukan ideologi negara yang menjadi penyalur kepentingannya, namun kepentingan elit partai pengusung yang

¹⁵⁰ Syamsul Rijal Hamid, *Ensiklopedi Agama Islam*, Bogor: Cahaya Salam, 2003, h. 73.

menjadi pemain dibalik layar. Kondisi seperti itu, menurut Kuntowijoyo merupakan suatu kemunduran dengan digantikannya politik berdasarkan kelas oleh politik aliran.¹⁵¹

Keteladanan pemimpin haruslah merupakan implementasi dari ungkapan “bahasa perbuatan lebih fasih dari bahasa ucapan”. Artinya, sesuatu yang memerlukan penjelasan verbal panjang-lebar, sering dapat dijelaskan hanya dengan satu tindakan yang nyata dengan ketulusan hati. Bukan dengan tindakan yang untuk membangun citra di masyarakat.

Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan kepemimpinan al-Farabi maka pemimpin yang dibutuhkan Indonesia adalah pemimpin yang mampu berdikari, kuat, cerdas dalam memberikan solusi untuk problematika bangsa. Yaitu, pemimpin yang dari segi religius, filosofis, politis, etika dan moral mampu mengentaskan bangsa dari masalah-masalah yang sedang berkecamuk di Indonesia.

¹⁵¹Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan, h.83.

Sehingga, dapat membawa masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang adil dan makmur.

Dari segi religius dan filosofis, pemimpin Indonesia haruslah merupakan pemimpin bijak yang mempunyai ilmu pengetahuan luas. Dari segi politis dan praktis, pemimpin Indonesia haruslah seorang yang mempunyai strategi cerdas untuk membawa Indonesia makmur dari segi ekonomi. Sebagai tonggak bangsa, pemimpin harus bisa membaca masalah sehingga mempunyai visi-misi yang jelas.

2. Relevansi Konsep Revolusi Ekonomi Ibnu Sina dengan Politik di Indonesia

Mengenai kesejahteraan, Indonesia bisa melalui langkah dari revolusi ekonomi yang gagas oleh Ibnu Sina. Ibnu Sina percaya soal ekonomi menjadi revolusi sosial yang terpenting. Belajar dari sejarah Islam, Nabi Muhammad memulai dengan membangun perekonomian umat Islam yang saat itu masih sedikit jumlahnya. Kaum Anshar yang kaya dipersatukan dengan kaum muhajirin yang saat itu hidup dalam kondisi miskin dalam hukum

persaudaraan, yang terkenal dalam sejarah dengan *Muakhah Islamiyah*.

Kemiskinan dan kesenjangan merupakan masalah pokok yang sedang dihadapi bangsa ini. kemiskinan dapat dinyatakan dengan angka yang absolut, misal dengan konsumsi, prosentase, atau jumlah tertentu. Kemiskinan itu berpangkal dari kesenjangan natural. Penyebab kemiskinan adalah akibat tidak samanya pendapatan, karena perbedaan unsur yang disetor ke pasar. Ada yang punya modal, ada yang punya otak, dan ada yang hanya punya tenaga saja.¹⁵² Jika ketiga aspek ini tidak proaktif dan tidak saling memahami maka, kemiskinanpun tak bisa terelakkan.

Maka, berdasarkan pemikiran ekonomi Ibnu Sina, yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia membangun persaudaraan semua pihak agar saling membantu dan menguntungkan. Dengan cara mengurus kesenjangan struktur yang disebabkan oleh peraturan-

¹⁵²*Ibid*, Kuntowijoyo, h.45.

peraturan yang hanya menguntungkan beberapa pihak dengan peraturan yang menguntungkan bagi semua pihak.

Dimulai dari ekonomi rumah tangga, yang menempatkan istri dan anak-anak sebagai pembantu utama, dan ekonomi masyarakat yang sudah mulai membutuhkan orang yang cekatan dengan semakin besar perusahaan semakin banyak pula membutuhkan pegawai yang cekatan. Barulah setelah itu mencapai ekonomi negara. Dalam hal ini, kepala negara merupakan penggembala yang memelihara untuk memajukan kemakmuran masyarakatnya.

Untuk itu, Ibnu Sina¹⁵³ berpendapat bahwa perlu ada politik ekonomi yang tegas menuju kepada keadilan dan kemakmuran yang sifatnya menyeluruh. Tujuan politik ekonomi negara itu haruslah, pertama keseragaman seluruh masyarakat untuk mewujudkan perekonomian yang maju dan kerjasama dari semua golongan.

Kedua, kestabilan ekonomi, sehingga kondisi pemerintah dan masyarakat tidak goncang. Masyarakat

¹⁵³ H. Zainal Abidin Ahmad, Negara Adil Makmur..., *op. Cit*, h.188.

tidak boleh dipertaruhkan untuk kepentingan golongan tertentu. Selain itu, jalan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi harus dilakukan dengan cara-cara yang halal. Untuk itu, sebagai langkah pendampingan, maka pemimpin harus mampu membuat sistem perekonomian yang halal.

Jadi, apabila Indonesia dapat mewujudkan pemimpin dan masyarakat yang cerdas, kuat, religius, unggul tersebut, sesuai dengan konsep al-Farabi dan Ibnu Sina, maka kita dapat melihat bahwa perkembangan politik Indonesia menuju kepada negara yang bahagia. Namun demikian, seperti yang diungkapkan oleh al-Farabi dan Ibnu Sina, harus ada kemauan dan kesadaran politik dari pemimpin dan warga negara untuk mencapai kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut;

1. Konsep Negara Ideal al-Farabi dan Ibnu Sina

Menurut al-Farabi, negara utama ibarat tubuh manusia yang sempurna dan sehat.¹⁵⁴ Semua organ tubuh bekerjasama sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Di dalam tubuh manusia terdapat organ yang paling vital, yaitu jantung. Jantung sebagai koordinator dari organ-organ lain. Al-Farabi mengibaratkan jantung sebagai pemimpin dalam negara utama. Pemimpin di negara utama memegang peranan penting dalam mewujudkan tujuan negara utama, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Maka dari itu, pemimpin negara utama harus dari kalangan Filosof yang berkarakter nabi (*Philosopher Prophet*). Al-Farabi memberikan 12 kriteria sebagai berikut yang disebutnya

¹⁵⁴ *Ibid*, h. 118.

sebagai *Imâm* yaitu: Memiliki anggota badan yang sempurna, daya pemahaman dan penggambaran yang baik, daya hafal yang kuat, kepintaran dan kecerdasan, memiliki kemampuan retorika yang baik, cinta pada ilmu pengetahuan, segala yang dikonsumsi diperoleh dari jalan yang baik, mencintai kejujuran, memiliki jiwa besar, memandang segala sesuatu yang bersifat dunia adalah urusan remeh, mencintai keadilan, memiliki kemauan keras untuk melakukan sesuatu yang benar. Apabila tidak ada orang yang sesuai dengan dua belas kualitas luhur itu, maka al-Farabi memberi alternatif ke dua yang dia sebut sebagai *al-Ra'îs* yaitu: Bijaksana, Mengerti dan mampu melaksanakan undang-undang, memiliki kecerdasan dalam mengambil kesimpulan, memiliki pandangan masa depan, mampu memberikan nasehat, dan memiliki badan sehat.

Dalam kitab *Ârâ Ahl Madînah al-Fâdlilah*, al-Farabi membagi negara berdasarkan Ideologi warga. Ideologi warga negara utama mempunyai prinsip yang benar yaitu prinsip yang mengandung kebajikan. Negara Utama, Sedangkan, ideologi dari lawan negara utama

mempunyai prinsip-prinsip yang salah yaitu prinsip yang mengutamakan kesenangan dunia. Lawan negara utama seperti Negara bodoh (*al-Madînah al-Jâhiliyyah*), Negara Fasik (*al-Madînah Fâsiqah*), Negara Sesat (*al-Madînah al-Dhalâlah*), dan Negara yang berubah (*al-Madînah al-Mutabaddilah*).

Sedangkan negara adil makmur (*al-Madînah al-Isytirâkiyah*) menurut Ibnu Sina seperti miniatur rumah tangga. Seorang laki-laki sebagai kepala rumah tangga yang mampu menyejahterakan keluarga. Begitupula kepala negara di negara adil makmur harus memiliki sifat kebapakan yang mampu mengayomi seluruh rakyat. Untuk mewujudkan negara adil makmur, Ibnu Sina menitikberatkan soal rakyat dibanding kepala negara atau berorientasi dari bawah ke atas (*bottom up*). Kehadiran rakyat memegang peranan penting dalam menentukan kemajuan negara. Maka, untuk menciptakan negara adil makmur, Ibnu Sina menetapkan tiga prinsip yang harus diatur dalam undang-undang, yaitu: Pertama, Prinsip-prinsip politik. Kedua, prinsip-prinsip kebijaksanaan tentang ekonomi. Ketiga, prinsip-prinsip mengenai

rumah tangga atau keluarga. Pertama, Prinsip politik. Ibnu Sina membagi tugas negara kepada tiga golongan dengan keahlian masing-masing, yaitu: Pemerintah, pengusaha, dan pengamanan. Kedua, prinsip kebijaksanaan tentang ekonomi. Negara mempunyai harta kolektif "*Mâl Musytarak*", yaitu harta untuk kepentingan masyarakat bersama. Negara membuat undang-undang tentang siapa yang pantas mendapatkan bantuan dari negara dan tidak. Ketiga, prinsip rumah tangga atau keluarga. Pembicaraan mengenai prinsip-prinsip sosial, Ibnu Sina memusatkan kepada persoalan perkawinan. Baik mengenai perkawinan, peneguhan hubungan suami istri, perceraian, nafkah, dan soal pendidikan anak.

Syarat bagi kepala negara adalah harus mempergunakan dan berpegang teguh kepada dua warisan yang ditinggalkan oleh Nabi dan filosof, yaitu warisan syari'at (hukum-hukum Islam), dan warisan hukum negara dan perundang-undangan. Ibnu Sina menetapkan beberapa syarat seorang pemimpin, antara lain: Mempunyai kecerdasan akal yang mendalam,

akhlak mulia, pemberani, visi dan misi yang jelas, mengerti hukum syari'ah secara baik yang termanifestasi dari pemikirannya, serta disetujui secara umum.

Dalam konsep kepemimpinan, al-Farabi bisa menghendaki sistem parlementer, sedangkan menurut Ibnu Sina tidak ada sistem parlementer.

2. Al-Farabi dan Ibnu Sina memiliki tujuan yang sama dalam membangun negara, yaitu untuk mencapai kebahagiaan (*al-Sa'âdah*), baik di dunia maupun di akhirat. Dengan adanya kerjasama antar warga negara, maka akan tercipta kebahagiaan material dan spiritual. Konsep kenegaraan al-Farabi dan Ibnu Sina berlandaskan pada al-Qur'an dan Hadits. Namun, dibalik persamaan itu terdapat perbedaan pemikiran antara keduanya. Ibnu Sina menitikberatkan soal kepala negara kemudian rakyat. Sebab, menurutnya, rakyat adalah cerminan kesejahteraan negara. Apabila rakyat sudah bagus, maka akan melahirkan kepala negara yang bagus pula. Adapun al-Farabi sebaliknya, ia lebih menitikberatkan soal kepala negara dibanding rakyat (*top down*). Sebab, yang dapat membawa rakyat menuju kebahagiaan dunia dan

akhirat adalah pemimpin utama dari negara utama. Yang menyebabkan perbedaan orientasi mereka adalah tingkat pengalaman dalam ranah politik. Ibnu Sina berteori dan pernah mempraktekkannya dalam pemerintahan pada saat itu, meskipun ia memperoleh kegagalan. Sedangkan, al-Farabi belum pernah mempraktekkan teorinya.

3. Relevansi konsep al-Farabi dan Ibnu Sina dengan politik Indonesia

Pemimpin yang dibutuhkan Indonesia adalah pemimpin yang mampu berdikari, kuat, cerdas dalam memberikan solusi untuk problematika bangsa. Yaitu, pemimpin yang dari segi religius, filosofis, politis, etika dan moral mampu mengentaskan bangsa dari masalah-masalah yang sedang berkecamuk di Indonesia. Sehingga, dapat membawa masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang adil dan makmur.

Dari segi religius dan filosofis, pemimpin Indonesia haruslah merupakan pemimpin bijak yang mempunyai ilmu pengetahuan luas. Dari segi politis dan praktis, pemimpin Indonesia haruslah seorang yang mempunyai strategi cerdas untuk membawa Indonesai

makmur dari segi ekonomi. Sebagai tonggak bangsa, pemimpin harus bisa membaca masalah sehingga mempunyai visi-misi yang jelas.

Maka, berdasarkan pemikiran ekonomi Ibnu Sina, yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia membangun persaudaraan semua pihak agar saling membantu dan menguntungkan. Dengan cara mengelola kesenjangan struktur yang disebabkan oleh peraturan-peraturan yang hanya menguntungkan beberapa pihak dengan peraturan yang menguntungkan bagi semua pihak.

B. Saran

Setelah penulis menyelesaikan tulisan skripsi ini, ada beberapa saran terkait pembahasan konsep Negara Ideal dari kedua tokoh, yaitu: al-Farabi belum menyinggung soal gaya kepemimpinan dan metode pengangkatan kepala negara. Metode ini sangat penting untuk mempermudah rakyat dalam menjalankan proses penentuan kepala negara.

Kajian pemikiran al-Farabi dan Ibnu Sina tentang Konsep Negara Ideal, terutama dalam hal perbedaan dan persamaan dari dua tokoh tersebut, merupakan manifestasi ketertarikan

akademis intelektual sarjana-sarjana Filosof Muslim terhadap sistem kenegaraan yang berlandaskan pada al-Qur'an dan Hadist. Apa yang telah dilakukan al-Farabi dan Ibnu Sina tersebut merupakan kontribusi yang dapat membuka cakrawala baru dalam kajian filsafat Islam, tentunya apabila diperhatikan dengan cara terbuka. Oleh karena itu perlu kiranya untuk diapresiasi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa kajian dalam skripsi masih jauh dari bentuk yang diharapkan, apalagi ada semacam maksim bahwa suatu kajian pasti meninggalkan ruang dan celah permasalahan yang menuntut pengkajian berikutnya guna menutupi dan melengkapi cela dan kekurangan penelitian tersebut.

Demikian juga dengan penelitian ini, yang menfokuskan pada pandangan al-Farabi dan Ibnu Sina, masih banyak hal yang perlu ditelaah, dielaborasi, dan dikritisi lebih tajam, sehingga menghasilkan manfaat yang lebih baik lagi.